

**PENGARUH PERENCANAAN ANGGARAN, KOMITMEN ORGANISASI,
REGULASI, DAN PEMAHAMAN SISTEM PROSEDUR PENGELOLAAN
KEUANGAN TERHADAP PENYERAPAN ANGGARAN PADA
PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG**



SKRIPSI

Oleh:

Nama: Nabila Yulia Dewi

No. Mahasiswa: 18312006

**FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2022

**PENGARUH PERENCANAAN ANGGARAN, KOMITMEN ORGANISASI,
REGULASI, DAN PEMAHAMAN SISTEM PROSEDUR PENGELOLAAN
KEUANGAN TERHADAP PENYERAPAN ANGGARAN PADA
PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG**

SKRIPSI

Disusun dan diajukan sebagai salah satu syarat untuk mencapai derajat Sarjana

Strata-1 Program Studi Akuntansi pada Fakultas Bisnis dan Ekonomika

Universitas Islam Indonesia

Oleh:

Nama: Nabila Yulia Dewi

No.Mahasiswa: 18312006

FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2022

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini atau disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.”

Yogyakarta, 10 Februari 2022

Penulis,



(Nabila Yulia Dewi)

**PENGARUH PERENCANAAN ANGGARAN, KOMITMEN ORGANISASI,
REGULASI, DAN PEMAHAMAN SISTEM PROSEDUR PENGELOLAAN
KEUANGAN TERHADAP PENYERAPAN ANGGARAN PADA
PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

Nama: Nabila Yulia Dewi

No.Mahasiswa: 18312006

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada Tanggal 10 Februari 2022

Dosen Pembimbing,



(Dekar Urumsah,Drs.,S.Si.,M.Com.(SI),Ph.D.)

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

Pengaruh Perencanaan Anggaran, Komitmen Organisasi, Regulasi, dan Pemahaman Sistem Prosedur Pengelolaan Keuangan terhadap Penyerapan Anggaran pada Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Magelang

Disusun oleh : NABILA YULIA DEWI

Nomor Mahasiswa : 18312006

Telah dipertahankan didepan Tim Penguji dan dinyatakan Lulus
pada hari, tanggal: Senin, 14 Maret 2022

Penguji/Pembimbing Skripsi : Dekar Urumsah, SE., S.Si., M.Com(IS), Ph.D.,
CFra.

Penguji : Hadri Kusuma, Prof., MBA., Ph.D



Mengetahui
Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Universitas Islam Indonesia



Prof. Jaka Sriyana, Dr., M.Si

HALAMAN MOTTO

إِلاهُمَّ يَا سَّيِّرُ وَالْأَتَى اسَّسِيرُ رَبِّي تَامِمِيمُ بِيْل كَهَائِرِ

Allahumma yassir wala tu'assir. Rabbi tammim bil khair.

“Ya Allah permudahkanlah, jangan dipersulit, dan akhirilah dengan kebaikan”

الْمَجْمَعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ الْإِنْدُونِيَّةُ

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pengaruh Perencanaan Anggaran, Komitmen Organisasi, Regulasi, dan Pemahaman Sistem Prosedur Pengelolaan Keuangan terhadap Penyerapan Anggaran pada Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Magelang”** dapat berjalan dengan baik. Tak lupa shalawat serta salam dihaturkan kepada junjungan besar umat Muslim Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat beliau.

Penelitian skripsi ini hanyalah sebuah karya sederhana yang tidak luput dari kekurangan dan kesalahan. Tujuan pembuatan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat untuk mencapai derajat Sarjana Strata-1 Akuntansi pada Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.

Proses penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bimbingan, pengarahan, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis hendak memberikan ucapan terimakasih yang tulus kepada:

1. Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya sehingga penulis selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan kelancaran selama proses penyusunan skripsi ini.

2. Kedua Orang Tua Penulis, Ibu Yuvita Isni Kadratin dan Bapak Syaifullah yang selalu memberikan semangat, dukungan, motivasi, kasih sayang tiada batas, dan doa yang tiada henti untuk penulis. Ibu dan Bapak merupakan anugerah terindah bagi penulis.
3. Adikku, Rahma Isni Artanti yang selalu ada untuk memberikan semangat dan motivasi, dan tentunya selalu mendoakan agar proses penyusunan skripsi ini diberi kelancaran dan kemudahan.
4. Bapak Fathul Wahid, S.T.,M.Sc.,Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia, beserta segenap pimpinan universitas.
5. Bapak Prof. Jaka Sriyana, S.E., M.Si.,Ph.D., selaku Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
6. Bapak Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D., selaku Ketua Jurusan Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
7. Bapak Mahmudi, Dr. S.E., M.Si., Ak., CMA. selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika beserta seluruh jajaran dosen, pegawai, dan *staff* Program Studi Akuntansi.
8. Bapak Dekar Urumsah, Drs.,S.Si.,M.Com.(SI),Ph.D. selaku dosen pembimbing skripsi. Terimakasih Bapak atas segala doa, motivasi, semangat, kesabaran, ilmu, pengalaman, waktu, perhatian, bimbingan, dan arahnya kepada penulis dalam proses penyusunan skripsi ini. Sebuah kehormatan karena mendapat kesempatan untuk mengenal dan menjadi mahasiswa bimbingan beliau.

9. Seluruh keluarga besar penulis yang tidak henti-hentinya memberikan doa dan dukungan kepada penulis.
10. *Luv squad*: Zita Panca Westhi Putri, Sheila Kurniawan, dan Amadea Jasmine Muna Hijannah selaku sahabat penulis. Terimakasih karena selalu ada, memberi dukungan dan motivasi dalam segala situasi, serta selalu mendoakan untuk kebaikan penulis. *My pleasure to know all of you guys.*
11. *Sadboi*: Arvidan Zufar Akbar dan Muhammad Ghiffari Azziqro. Terimakasih atas doa dan dukungannya sampai saat ini. Tidak lupa, kebaikan, kelawakan dan kelucuan mereka yang selalu membuat penulis merasa terhibur.
12. Baradia Saddam Ardiansyah yang selalu memberi semangat, motivasi, dan doa untuk penulis. Terimakasih karena selalu mau untuk mendengarkan setiap keluh kesah penulis.
13. Mas Fitra Januar selaku kakak tingkat yang telah menjadi salah satu *role-model* penulis dalam menjalani akademis perkuliahan.
14. Teman-teman kelas A. Terimakasih karena selalu mendukung dan memotivasi sejak mahasiswa baru hingga saat ini, dan mudah-mudahan seterusnya.
15. *Nodey*: Adelia Putri Febriyanti dan Yetti Dwi Karuniasari yang telah senantiasa mendukung dan mendoakan untuk kesuksesan penulis.
16. *Teman Sebatas Ngeluh AKKC*, terimakasih karena sudah mau menerima penulis sebagai teman dan sahabat. Terimakasih juga karena selalu mendukung dan menyemangati penulis.

17. Teman-teman Jurusan Akuntansi UII 2018 dan semua pihak yang turut serta membantu penulis di segala bidang kehidupan yang tidak dapat ditulis satu-persatu.

18. *Last but not least, I wanna thank me, for believing in me, for doing all this hard work, for having no days off, for never quitting, for just being me at all times.*

Mudah-mudahan Allah SWT selalu memberikan rahmat, berkah, umur panjang, kesehatan, dan rezeki yang melimpah kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu penulis menerima segala saran dan kritik membangun yang dapat membantu kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yogyakarta, 11 Februari 2022

Penulis,

Nabila Yulia Dewi

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUTAN	i
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Batasan Masalah	8
1.4 Tujuan Penelitian	8
1.5 Manfaat Penelitian	9
1.6 Sistematika Pembahasan	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	12
2.1 <i>Agency Theory</i>	12
2.2 <i>Goal Setting Theory</i>	13
2.3 Anggaran Sektor Publik	14
2.3.1 Sistem Penganggaran Sektor Publik	14
2.3.2 Fungsi Anggaran Sektor Publik	16
2.3.3 Jenis Anggaran Sektor Publik	18
2.3.4 Penyerapan Anggaran	19
2.4 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran	20
2.4.1 Perencanaan Anggaran	20
2.4.2 Komitmen Organisasi	21
2.4.3 Regulasi	22
2.4.4 Pemahaman Sistem Prosedur Pengelolaan Keuangan	22
2.5 Penelitian Terdahulu	23

2.6	Hipotesis Penelitian	30
2.6.1	Pengaruh Perencanaan Anggaran terhadap Penyerapan Anggaran	30
2.6.2	Pengaruh Komitmen Organisasi terhadap Penyerapan Anggaran ..	31
2.6.3	Pengaruh Regulasi terhadap Penyerapan Anggaran	32
2.6.4	Pengaruh Pemahaman Sistem Prosedur Pengelolaan Keuangan terhadap Penyerapan Anggaran	33
2.7	Kerangka Penelitian	34
BAB III METODE PENELITIAN.....		35
3.1	Metode Penelitian.....	35
3.2	Populasi dan Sampel	35
3.3	Metode Pengumpulan Data	36
3.4	Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel	37
3.4.1	Penyerapan Anggaran	37
3.4.2	Perencanaan Anggaran.....	38
3.4.3	Komitmen Organisasi.....	40
3.4.4	Regulasi.....	41
3.4.5	Pemahaman Sistem Prosedur Pengelolaan Keuangan	43
3.5	Metode Analisis.....	44
3.5.1	Uji Validitas	44
3.5.2	Uji Reliabilitas	45
3.5.3	Uji Asumsi Klasik.....	45
3.5.4	Analisis Regresi Linear Berganda.....	46
3.5.5	Uji Statistik F	47
3.5.6	Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	48
3.5.7	Uji Statistik T	48
BAB IV ANALISIS DATA DAN HASIL PENELITIAN		49
4.1	Proses dan Hasil Pengumpulan Data.....	49
4.2	Uji Instrumen Penelitian.....	55
4.2.1	Hasil Uji Validitas.....	55
4.2.2	Hasil Uji Reliabilitas	56
4.3	Uji Asumsi Klasik	57
4.3.1	Uji Normalitas.....	57

4.3.2	Uji Multikolinearitas	58
4.3.3	Uji Heteroskedastisitas	59
4.4	Analisis Regresi Linear Berganda	59
4.5	Uji Statistik F	61
4.6	Uji Koefisien Determinasi (R^2)	61
4.7	Uji Statistik T	62
4.8	Pembahasan Hasil Penelitian	64
4.8.1	Pengaruh Perencanaan Anggaran terhadap Penyerapan Anggaran	64
4.8.2	Pengaruh Komitmen Organisasi terhadap Penyerapan Anggaran ..	66
4.8.3	Pengaruh Regulasi terhadap Penyerapan Anggaran	67
4.8.4	Pengaruh Pemahaman Sistem Prosedur Pengelolaan Keuangan terhadap Penyerapan Anggaran	68
BAB V PENUTUP		70
5.1	Kesimpulan	70
5.2	Kontribusi dan Implikasi Penelitian	71
5.2.1	Kontribusi Penelitian	71
5.2.2	Implikasi Penelitian	71
5.3	Keterbatasan dan Saran Penelitian	73
5.3.1	Keterbatasan Penelitian	73
5.3.2	Saran Penelitian	74
DAFTAR REFERENSI		76
LAMPIRAN – LAMPIRAN		81

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Penyerapan Anggaran Kabupaten Magelang Triwulan III (2016 – 2021)	4
Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu.....	23
Tabel 3. 1 Indikator Penyerapan Anggaran.....	38
Tabel 3. 2 Indikator Perencanaan Anggaran	39
Tabel 3. 3 Indikator Komitmen Organisasi	41
Tabel 3. 4 Indikator Regulasi	42
Tabel 3. 5 Indikator Pemahaman Sistem Prosedur Pengelolaan Keuangan	43
Tabel 4. 1 Hasil Pengumpulan Data	50
Tabel 4. 2 Rekapitulasi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	50
Tabel 4. 3 Rekapitulasi Responden Berdasarkan Usia Responden	51
Tabel 4. 4 Rekapitulasi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	51
Tabel 4. 5 Rekapitulasi Responden Berdasarkan Instansi/Perangkat Daerah Tempat Responden Bekerja	52
Tabel 4. 6 Rekapitulasi Responden Berdasarkan Jabatan pada Unit Kerja.....	53
Tabel 4. 7 Rekapitulasi Responden Berdasarkan Lama Menjabat	54
Tabel 4. 8 Rekapitulasi Responden Berdasarkan Lama Bekerja.....	55
Tabel 4. 9 Hasil Uji Validitas	56
Tabel 4. 10 Hasil Uji Reliabilitas	57
Tabel 4. 11 Hasil Uji Normalitas.....	58
Tabel 4. 12 Hasil Uji Multikolinearitas	58
Tabel 4. 13 Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	59
Tabel 4. 14 Hasil Uji Regresi Linear Berganda	60
Tabel 4. 15 Hasil Uji Statistik F	61
Tabel 4. 16 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	62
Tabel 4. 17 Hasil Uji Statistik T.....	63

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Penelitian..... 34



DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1: Kuesioner Penelitian	82
LAMPIRAN 2: Daftar Rekapitulasi Jawaban Responden	88
LAMPIRAN 3: Daftar Nama Perangkat Daerah	97
LAMPIRAN 4: Daftar Informasi Responden	99
LAMPIRAN 5: Hasil Uji Validitas	101
LAMPIRAN 6: Hasil Uji Reliabilitas	106
LAMPIRAN 7: Hasil Uji Asumsi Klasik	109
LAMPIRAN 8: Hasil Analisis Regresi Linear Berganda	112
LAMPIRAN 9: Tabel r untuk $df = (N-2)$	114



ABSTRACT

This study aims to examine the effect of budget planning, organizational commitment, regulation, and understanding of financial management procedures on budget absorption. The population used in this study were all regional apparatuses in Magelang Regency, amounting to 45 regional apparatuses. The object of research includes employees who are directly involved in budget management including the Head of the Program, Head of the Finance Division, and the Expenditure Treasurer by using the saturated sample technique where the sample used is the entire population, which is 106 respondents. The data analysis technique used is multiple linear regression using SPSS 25. The results of this study reveal that Budget Planning, Organizational Commitment, Regulation, and Understanding of the Financial Management Procedure System have a significant positive effect on Budget Absorption.

Keywords: *Budget Planning, Organizational Commitment, Regulation, Understanding of Financial Management Procedure System, Budget Absorption.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji Pengaruh Perencanaan Anggaran, Komitmen Organisasi, Regulasi, dan Pemahaman Sistem Prosedur Pengelolaan Keuangan terhadap Penyerapan Anggaran. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh perangkat daerah yang berada di Kabupaten Magelang yang berjumlah 45 Perangkat Daerah. Objek penelitian meliputi pegawai yang terlibat langsung dalam pengelolaan anggaran diantaranya Kasubag Program, Kasubag Keuangan, dan Bendahara Pengeluaran dengan menggunakan teknik sampel jenuh dimana sampel yang digunakan merupakan seluruh populasi yakni berjumlah 106 responden. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linear berganda menggunakan SPSS 25. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa Perencanaan Anggaran, Komitmen Organisasi, Regulasi, dan Pemahaman Sistem Prosedur Pengelolaan Keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap Penyerapan Anggaran.

Kata Kunci: Perencanaan Anggaran, Komitmen Organisasi, Regulasi, Pemahaman Sistem Prosedur Pengelolaan Keuangan, Penyerapan Anggaran.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anggaran bermakna sebagai instrumen akuntabilitas sebuah organisasi. Sektor swasta maupun sektor publik membutuhkan anggaran sebagai alat perencanaan dan pengendalian program dan aktivitas organisasinya. Setiap organisasi sektor publik akan membuat Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang berisi rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang nantinya akan menjadi acuan dalam penyusunan APBD. Anggaran sektor publik yang dibuat oleh pemerintah menjadi kebutuhan bagi masyarakat sehingga anggaran merupakan *blueprint* keberadaan sebuah Negara dan arah untuk masa depan (Mahsun, 2006). RKA dibuat oleh pemerintah dengan mempertimbangkan tujuan dan fokus penggunaan anggaran yang ditetapkan negara pada tahun berjalan.

Sesuai dengan informasi APBN oleh Kementerian Keuangan, fokus anggaran tahun 2021 yakni percepatan pemulihan kesehatan dan ekonomi serta penguatan reformasi sebagai upaya dalam mengatasi dampak pandemi Covid-19. Pemerintah dalam hal ini melakukan *refocusing* anggaran sebagai perwujudan visi anggaran pemerintah tahun ini. Pada bidang kesehatan, pemerintah berencana melakukan peningkatan mutu sumber daya kesehatan dan penguatan sistem kesiapsiagaan untuk menghadapi kondisi darurat di masa depan. Dalam hal ekonomi, terdapat beberapa kebijakan antara lain pemberian dukungan terhadap sektor terdampak dan pemberian dampingan terhadap pelaku UMKM dengan perluasan modal. Sedangkan untuk fokus hal reformasi akan mengarah pada penguatan fondasi untuk

mendorong pemulihan ekonomi dengan cara mendesain ulang sistem penganggaran dan melakukan relaksasi prosedur.

Berkaitan dengan fokus APBN 2021, Pemerintah Daerah secara otomatis akan menyesuaikan fokus tersebut yang diimplementasikan pada APBD 2021. Berdasarkan siaran pers Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia (31/8) mengenai *refocusing* anggaran dan inovasi pemerintah daerah untuk meminimalisir dampak pandemi Covid-19, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto mengungkapkan bahwa dalam upaya pemulihan ekonomi masyarakat, pemerintah daerah diharapkan dapat mempercepat penyerapan anggaran. Dalam siaran pers tersebut juga ditekankan bahwa pemerintah daerah harus bersikap cepat tanggap dan senantiasa berinovasi dalam pelayanan publik yang dapat diwujudkan dalam kebijakan yang akan diterapkan maupun program kerja yang akan dibuat.

Optimalisasi pelayanan publik dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat apabila dalam pelaksanaannya dilakukan secara efektif dan efisien. Namun, pada kenyataannya, pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah terkadang masih mengalami keterlambatan. Hal tersebut salah satunya dikarenakan penyerapan anggaran yang kurang optimal. Penyerapan anggaran secara sederhana merupakan perbandingan anggaran dengan realisasinya. Penyerapan anggaran yang gagal mencapai target mengakibatkan hilangnya manfaat belanja karena dana yang dialokasikan ternyata tidak semuanya dapat dimanfaatkan, yang artinya terjadi *idle money* (BPKP, 2011). Ketika target penyerapan anggaran tidak tercapai, maka

yang terjadi adalah *inefisiensi* dan *inefektivitas* pengalokasian anggaran (BPKP, 2011).

Sesuai yang diberitakan Tagar.id (21/10/2020), realisasi kegiatan fisik dan keuangan APBD Kabupaten Magelang tahun anggaran 2020 di tiga bulan menuju triwulan IV tergolong rendah dan jauh dari target yang telah dicanangkan. Dilihat dari data perbandingan persen keuangan penyerapan anggaran, realisasi penyerapan anggaran Kabupaten Magelang masih dibawah target dimana rata-rata target yang ditetapkan ada pada kisaran angka 70 persen. Tabel 1.1 berikut merepresentasikan persen keuangan serapan anggaran Pemerintah Kabupaten Magelang pada saat triwulan III yang disajikan dalam kurun waktu 6 tahun terakhir (tahun 2016 sampai dengan tahun 2021).

Realisasi penyerapan anggaran tahun 2016 baru mencapai 35,34% dari pagu anggaran yang artinya terdapat 64,66% dana yang belum dibelanjakan. Tahun 2017, jumlah anggaran yang belum terserap turun menjadi 70,28%. Sedangkan pada tahun 2018 hingga tahun 2021 realisasi penyerapan anggaran berangsur-angsur mengalami peningkatan. Persen keuangan yang belum terserap pada triwulan III tahun 2016 adalah sebesar 63,51%. Pada tahun 2019, angka persen anggaran yang belum terserap menurun menjadi 47,57%. Kemudian pada tahun 2020, persen anggaran yang belum terserap meningkat kembali menjadi 59,16% dikarenakan efek pandemi Covid-19. Keadaan tersebut dapat membaik karena strategi *refocusing* anggaran yang dilakukan, sehingga pada tahun 2021 jumlah persen anggaran yang belum terserap menurun dibandingkan tahun sebelumnya menjadi 43,87%.

Tabel 1. 1 Penyerapan Anggaran Kabupaten Magelang Triwulan III (2016 – 2021)

Triwulan III	% Keuangan
2016	35,34
2017	29,72
2018	36,49
2019	52,43
2020	40,84
2021	56,13

Sumber: Data Administrasi Kasubbag Adminbangda

Dengan melihat keadaan yang sudah diuraikan sebelumnya, terlihat persen realisasi anggaran yang muncul pada triwulan III belum mencapai target yang diinginkan yakni sebesar 70%. Target tersebut dapat tercapai apabila persen yang belum terserap setidaknya hanya boleh mencapai angka maksimal di 30%. Sedangkan jika dilihat dari realita persen angka anggaran yang belum terserap, persen anggaran yang belum terserap pada tahun 2016 hingga tahun 2021 masih di atas 30%.

Realita yang dijelaskan sebelumnya menunjukkan permasalahan serapan anggaran pada Pemerintah Kabupaten Magelang. Permasalahan yang muncul didukung oleh faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan tersebut. Dengan berdasar pada penelitian terdahulu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui beberapa faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran.

Penelitian terkait faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran telah banyak diteliti oleh peneliti sebelumnya dengan menggunakan beberapa teori antara lain *Agency Theory* (Ramdhani dan Anisa, 2017); (Elim *et al.*, 2018) dan *Goal Setting Theory* (Ramdhani dan Anisa, 2017); (Putri *et al.*, 2017). Berdasarkan

penelitian-penelitian tersebut, peneliti menggunakan kerangka *agency theory* dan *goal setting theory* untuk mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran yang terdiri dari beberapa konstruksi yaitu perencanaan anggaran, komitmen organisasi, regulasi, dan pemahaman sistem prosedur pengelolaan keuangan.

Perencanaan Anggaran berkaitan dengan bagaimana mendapatkan dan mengalokasikan uang dengan tujuan penggunaan dana untuk masa depan dapat tepat sasaran (Salwah, 2019). Dari banyak titik kritis permasalahan serapan anggaran, tahap perencanaan merupakan faktor penting dalam anggaran karena arah dalam proses pelaksanaan serta tercapai atau tidaknya sasaran bergantung pada tahap ini. Meskipun perencanaan yang baik belum menjadi jaminan mutlak menghasilkan pencapaian sasaran yang baik pula, namun perencanaan yang buruk sudah tentu akan menghasilkan pencapaian sasaran yang buruk (BPKP, 2011). Ramdhani dan Anisa (2017) menyatakan bahwa perencanaan anggaran memiliki pengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran. Perencanaan anggaran yang baik dapat menghambat penyerapan anggaran yang lambat sehingga program dan kegiatan pemerintah dapat terlaksana sesuai target.

Komitmen Organisasi mengacu pada ikatan yang terbentuk antara pekerja dan organisasi yang mempekerjakan (Griffin *et al.*, 2010). Penyerapan anggaran yang kurang maksimal dapat dikarenakan oleh lemahnya komitmen organisasi (Arif dan Halim, 2013). Putri *et al.*, (2017) mengatakan bahwa komitmen organisasi berpengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran. Kuatnya komitmen akan membuat sumber daya organisasi dapat diberdayakan secara maksimal (Alumbida

et al., 2016). Berkaitan dengan penganggaran, pegawai yang memiliki komitmen tinggi akan mengusahakan program dan kegiatan yang telah dianggarkan dapat terlaksana dengan baik (Putri *et al.*, 2017). Realisasi program yang sesuai target mengindikasikan anggaran dalam organisasi terserap secara maksimal.

Regulasi bermakna sebagai panduan dalam mengatur petunjuk penataan suatu hal serta menyangkut apa yang harus dipatuhi dan dijalankan (Bastian, 2006). Regulasi dapat menjadi faktor masalah yang berefek pada tidak maksimalnya penyerapan anggaran karena aturan yang terlalu banyak serta sering dilakukannya perubahan baik pada peraturan pemerintah pusat maupun daerah (Handayani, 2017). Maka dari itu, adanya regulasi memiliki pengaruh terhadap penyerapan anggaran (Alimuddin, 2018). Selain terkait faktor perubahan, regulasi erat kaitannya juga dengan pemahaman dan kepatuhan pegawai. Sanjaya (2018) mengatakan perspektif lain tentang adanya regulasi yang berpengaruh terhadap penyerapan anggaran dengan melihat paham dan patuhnya pegawai terhadap peraturan yang ada. Sehingga dalam proses penyerapan anggaran, adanya kebijakan yang sudah berjalan berefek terhadap segala tindakan yang dilakukan oleh pegawai perangkat daerah.

Pemahaman sistem prosedur pengelolaan keuangan merupakan indikator yang tidak kalah penting terkait hubungannya dengan penganggaran. Pemahaman sistem dalam hal ini sistem akuntansi, bermakna pegawai yang paham terhadap bentuk pelaporan akuntansi serta informasi keuangan yang berfungsi dalam hal pengambilan keputusan (Widiawati, 2019). Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, pengelolaan keuangan daerah didefinisikan sebagai seluruh

kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Annisa (2017) menemukan terdapat pengaruh secara parsial positif signifikan antara sistem akuntansi keuangan dan pengelolaan keuangan terhadap penyerapan serta kinerja anggaran. Semakin baik sistem akuntansi dan pengelolaan keuangan daerah, maka kinerja pemerintah akan anggaran salah satunya dalam hal penyerapan anggaran akan meningkat.

Penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya milik (Ramdhani dan Anisa, 2017). Perbedaan terletak pada pembaharuan penelitian yang menggunakan variabel regulasi dan komitmen organisasi yang mana merupakan saran penelitian (Ramdhani dan Anisa, 2017). Selain itu, peneliti menambahkan variabel pemahaman sistem prosedur pengelolaan keuangan dikarenakan penggunaan variabel tersebut masih jarang diteliti pada organisasi sektor publik kaitannya dengan penyerapan anggaran. Terlebih, belum ada penelitian mengenai penyerapan anggaran dengan objek Perangkat Daerah Kabupaten Magelang yang memakai variabel pemahaman sistem prosedur pengelolaan keuangan. Penelitian ini masih relevan untuk diteliti lebih lanjut sebab kondisi mengenai penyerapan anggaran sampai dengan triwulan III tahun anggaran 2021, Kabupaten Magelang masih belum dapat memenuhi target. Kondisi tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Operasional Kegiatan Triwulan III Tahun Anggaran 2021 (27/10/2021). Melihat kondisi tersebut, dalam hal ini peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Perencanaan Anggaran, Regulasi,

Komitmen Organisasi, dan Pemahaman Sistem Prosedur Pengelolaan Keuangan terhadap Penyerapan Anggaran pada Pemerintah Kabupaten Magelang”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah terdapat pengaruh perencanaan anggaran terhadap penyerapan anggaran?
2. Apakah terdapat pengaruh komitmen organisasi terhadap penyerapan anggaran?
3. Apakah terdapat pengaruh regulasi terhadap penyerapan anggaran?
4. Apakah terdapat pengaruh pemahaman sistem prosedur pengelolaan keuangan terhadap penyerapan anggaran?

1.3 Batasan Masalah

Penelitian ini membahas faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran pada organisasi sektor publik. Sebagai batasan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman penafsiran maupun pengertian, peneliti dalam hal ini menentukan batas penelitian yakni meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran berupa perencanaan anggaran, komitmen organisasi, regulasi, dan pemahaman sistem prosedur pengelolaan keuangan yang dilakukan di lingkup perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Magelang.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh perencanaan anggaran terhadap penyerapan anggaran.
2. Untuk mengetahui pengaruh komitmen organisasi terhadap penyerapan anggaran.
3. Untuk mengetahui pengaruh regulasi terhadap penyerapan anggaran.
4. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman sistem prosedur pengelolaan keuangan terhadap penyerapan anggaran.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini bermanfaat bagi berbagai pihak, diantaranya:

1. Manfaat Teoritik

Penelitian ini memberikan kontribusi pada wacana teoritik yang berhubungan dengan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran. Bagi pembaca, penelitian ini diharapkan mampu memberi pengetahuan lebih mengenai penelitian yang membahas tentang penyerapan anggaran. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan mengenai penyerapan anggaran khususnya pada sektor publik. Serta bagi para peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan acuan untuk melakukan penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktik

a. Bagi Pemerintah

Sebagai masukan dan bahan evaluasi khususnya bagi pengguna anggaran dalam lingkup pemerintah Kabupaten Magelang kaitannya dengan proses penganggaran, implementasi kebijakan anggaran, serta kinerja anggaran.

b. Bagi Masyarakat

Memberi informasi kepada masyarakat terkait kondisi realitas anggaran terkini bahwa kondisi yang ada berhubungan dengan pengelolaan dana masyarakat.

c. Bagi Peneliti

Penelitian ini berguna bagi peneliti sebagai ajang media belajar yang dapat menambah pengalaman serta mengetahui secara lebih dalam realitas yang ada pada kondisi sosial dan masyarakat khususnya di bidang akuntansi sektor publik.

1.6 Sistematika Pembahasan

Penelitian ini terbagi menjadi lima bab yang disusun secara sistematis dengan rincian sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan

Bab ini menguraikan mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II: Kajian Pustaka

Bab ini membahas tentang landasan teori, kajian pustaka, uraian hipotesis-hipotesis yang akan diuji serta kerangka model penelitian.

BAB III: Metode Penelitian

Bab ini menguraikan mengenai metode penelitian, populasi dan sampel, metode pengumpulan data, definisi operasional variabel dan pengukuran variabel, dan metode analisis.

BAB IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini membahas mengenai hasil penelitian berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan, serta pengujian dan pembahasan penelitian.

BAB V: Penutup

Bab ini membahas mengenai kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisis pada bab-bab sebelumnya, kontribusi dan implikasi penelitian, keterbatasan penelitian yang dirasakan peneliti, dan saran untuk peneliti selanjutnya.



BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab kajian pustaka mendeskripsikan relevansi antara teori yang digunakan dengan rumusan masalah sebuah penelitian. Deskripsi yang ada didapat dari berbagai literatur yang berhubungan dengan teori yang digunakan. Bab ini berfungsi sebagai pembangun teori yang menjadi dasar penelitian (Sujarweni, 2014). Dalam hal ini, peneliti menggunakan *agency theory* dan *goal setting theory* sebagai teori utama penunjang topik penelitian. Selanjutnya, berkaitan dengan penganggaran sektor publik dijelaskan beberapa hal yakni anggaran sektor publik, sistem penganggaran sektor publik, fungsi anggaran sektor publik, jenis anggaran sektor publik. Berhubungan dengan penelitian, peneliti menjelaskan masing-masing variabel yang akan diteliti beserta pengaruhnya terhadap variabel dependen yang digunakan. Pada bab ini terdapat juga detail mengenai penelitian terdahulu, hipotesis yang diajukan peneliti, beserta kerangka penelitiannya.

2.1 Agency Theory

Agency theory merupakan cabang dari *game theory* yang mempelajari desain kontrak yang bertujuan untuk memotivasi agen rasional untuk bertindak dengan atas nama prinsipal ketika kepentingan agen bertentangan dengan prinsipal (Scott, 2009). Scott (1997) menemukan bahwa inti utama desain kontrak *agency theory* terletak pada kepentingan agen dan prinsipal yang sejalan dalam menyikapi *conflict of interest*. Dalam sektor publik terdapat dua pihak yang mengadakan kontrak yakni legislatif yang memberikan kewenangan (sebagai prinsipal) dan eksekutif yang menerima kewenangan (sebagai agen) (Arifah, 2012).

Peran *agency theory* dalam penganggaran publik disampaikan oleh Smith dan Bertozzi (2010) bahwa *agency theory* memberikan kontribusi yang cukup besar dari sebagian besar tahap penganggaran publik. Model prinsipal-agen menawarkan *tools* analisis untuk menyiapkan dan mengimplementasikan penganggaran secara lebih kuat (Smith dan Bertozzi, 2010). Dalam hal itu, eksekutif sebagai agen merencanakan setiap kegiatan dan program sebagai bentuk pelayanan publik kemudian mengalokasikan anggaran untuk beberapa hal tersebut dengan mempertimbangkan prioritas. Berbagai usulan kegiatan dan program tersebut kemudian disampaikan kepada legislatif untuk dibahas terlebih dahulu sebelum kemudian disahkan menjadi peraturan daerah.

2.2 Goal Setting Theory

Locke (1968) menyatakan bahwa dalam *goal setting theory*, tujuan serta tanggung jawab individu merupakan faktor penentu individu dalam melakukan suatu usahanya. Tujuan dalam *goal setting theory* harus secara jelas terukur, tidak bermakna ganda, serta terdapat rentang waktu tertentu untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Dalam organisasi sektor publik, makna teori ini dapat dilihat pada sejauh mana pegawai berkomitmen dalam individu mencapai tujuan, misalnya pada karyawan yang konsisten dengan visi tujuan perusahaan. Sedangkan manajer tingkat atas berusaha memahami kompleksitas tugas agar tujuan dan kinerja organisasi dapat tercapai. Hal itu dilakukan dengan memastikan pekerjaan yang ada tidak melebihi kapasitas dan terdapat kelonggaran waktu untuk menyelesaikannya.

Goal setting theory menjelaskan apa yang menjadi penyebab beberapa individu tampil lebih baik dalam melaksanakan tugas yang berhubungan dengan

pekerjaan yang dibebankan kepada mereka, dibanding dengan sebagian individu lainnya (Junita, 2018). Dalam berperilaku saat bekerja, individu yang paham akan tujuan akan menghasilkan kualitas kerja yang baik. Hal tersebut didasari oleh motivasi masing-masing individu dalam berperilaku. Kaitannya dengan anggaran, pemahaman yang baik oleh individu terhadap tujuan anggaran akan mempengaruhi kualitas hasil pekerjaan selama proses penganggaran (Octariani *et al.*, 2017).

2.3 Anggaran Sektor Publik

Anggaran merupakan suatu rencana yang digunakan sebagai instrumen perencanaan yang meliputi aspek keuangan maupun non keuangan (Alim, 2008). Anggaran adalah sebuah rencana keuangan yang berguna untuk alat pengendalian dan perencanaan jangka pendek organisasi dalam periode satu tahun (Anthony dan Govindarajan, 2011). Secara umum, anggaran berfungsi memberikan arah atas kegiatan atau aktivitas yang akan dikerjakan sehingga kegiatan yang akan dilakukan lebih terarah menuju tujuan yang dikehendaki (Nasution, 2019). Anggaran dalam sektor publik bermakna sebuah rencana yang dipresentasikan dalam rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter (Mardiasmo, 2004). Rencana tersebut selanjutnya akan dibandingkan dengan periode sebelumnya serta menunjukkan persyaratan di masa yang akan datang (Kevin, 1987).

2.3.1 Sistem Penganggaran Sektor Publik

Sistem penganggaran sektor publik terdiri dari *Line-Item Budgeting*, *Incremental Budgeting*, *Planning Programming Budgeting System*, *Zero Based*

Budgeting System, Performance Based Budgeting System, dan Medium Term Budgeting Framework (Oktaverina *et al.*, 2019).

a. *Line-Item Budgeting*

Sistem *Line-Item Budgeting* mengacu pada pos penerimaan dan pengeluaran. Pos penerimaan menggambarkan asal dana yang akan digunakan. Sedangkan pos pengeluaran memberi gambaran mengenai informasi penggunaan dana yang keluar. Sistem penganggaran ini merupakan cara tradisional dan dianggap mudah untuk diterapkan.

b. *Incremental Budgeting*

Incremental Budgeting merupakan sistem penganggaran berjalan yang menggunakan anggaran tahun sebelumnya sebagai acuan, namun dengan menyesuaikan *margin* tahun berjalan dengan cara menambah atau mengurangi.

c. *Planning Programming Budgeting System* (PPBS)

PPBS dilaksanakan berdasar sistem dalam hal proses perencanaan, pembuatan program, dan penganggaran. PPBS dijalankan dengan menjadikan program sebagai acuan, yaitu menggunakan pengelompokan aktivitas sebagai pencapaian tujuan.

d. *Zero Based Budgeting System* (ZBB)

ZBB tidak mendasarkan pada anggaran sebelumnya sebagai dasar melainkan dengan menggunakan perkiraan kegiatan yang akan dijalankan. Penggunaan sistem ini bertujuan untuk mengembangkan program kegiatan yang akan direalisasikan pada tahun bersangkutan.

e. *Performance Based Budgeting System (PBBS)*

PPBS merupakan sistem penganggaran dengan menggunakan pendekatan kinerja yang bertujuan untuk keperluan pengukuran kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran anggaran. PPBS dilakukan dengan memperhatikan *output* dan *outcome* atas pendanaan yang dikeluarkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil keluaran.

f. *Medium Term Budgeting Framework (MTBF)*

MBTF merupakan sistem penganggaran berdasar pada anggaran belanja organisasi sebagai kerangka strategi kebijakan. Sistem ini berkaitan dengan penentuan alokasi dan penggunaan sumber daya. Sumber daya yang ada digunakan untuk menyesuaikan penetapan komponen anggaran, usulan, serta perkiraan anggaran biaya.

2.3.2 Fungsi Anggaran Sektor Publik

Anggaran sektor publik memiliki beberapa fungsi utama yakni alat perencanaan, alat pengendalian, alat kebijakan fiskal, alat politik, alat koordinasi dan komunikasi, alat penilaian kinerja, dan alat motivasi (Mardiasmo, 2004).

a. *Alat Perencanaan*

Anggaran dalam makna perencanaan dibuat sebagai acuan tindakan yang akan dilakukan pemerintah dalam menetapkan biaya belanja yang dibutuhkan dan mengetahui hasil yang diperoleh.

b. *Alat Pengendalian*

Pengendalian dalam anggaran berfungsi sebagai kontrol pendapatan dan pengeluaran pemerintah. Pendapatan yang diperoleh akan dikendalikan agar

belanja yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan. Sementara pengeluaran akan dikontrol supaya tidak terjadi pemborosan.

c. Alat Kebijakan Fiskal

Stabilisasi dan percepatan pertumbuhan ekonomi dapat terdorong dengan adanya anggaran karena arah kebijakan fiskal pemerintah dapat diprediksi. Dalam hal perekonomian kegiatan-kegiatan akan didorong, difasilitasi, dan dikoordinir menggunakan anggaran.

d. Alat Politik

Anggaran sebagai alat politik dalam sektor publik mengandung kolaborasi antar dua pihak yakni eksekutif dan legislatif. Kedua pihak tersebut berkomitmen mempertahankan kredibilitas pemerintah dengan cara memiliki *political skill* yang baik serta menambah keahlian bernegosiasi. Hal tersebut penting dikarenakan penggunaan anggaran bergantung pada komitmen kedua belah pihak tersebut.

e. Alat Koordinasi dan Komunikasi

Dalam konteks alat koordinasi, satuan kerja pada sektor publik secara bersama-sama menyusun anggaran dengan baik sehingga apabila terdapat realisasi tujuan yang tidak sesuai dapat segera dikoordinasikan. Sedangkan dalam hal alat komunikasi, anggaran harus selalu dikomunikasikan dengan baik antar pihak dalam organisasi.

f. Alat Penilaian Kinerja

Pihak eksekutif sebagai pemegang anggaran dalam hal ini memberikan bukti nyata komitmennya kepada pihak legislatif yang telah memberi wewenang.

Kinerja dalam anggaran diukur menggunakan tolok ukur pencapaian target dan efisiensi pelaksanaannya.

g. Alat Motivasi

Setiap pegawai dalam satuan kerja dapat menggunakan anggaran sebagai alat motivasi dengan cara bekerja secara ekonomis, efektif, dan efisien kaitannya dengan pencapaian target dan tujuan organisasi.

2.3.3 Jenis Anggaran Sektor Publik

Nordiawan dan Hertianti (2010) mengatakan jenis anggaran dalam sektor publik terdiri dari beberapa macam, yaitu :

1. Anggaran Operasional dan Anggaran Modal

Pengelompokkan jenis anggaran yang terdiri dari anggaran operasional dan anggaran modal merupakan pengelompokkan anggaran berdasarkan aktivitasnya. Anggaran operasional merupakan anggaran yang digunakan untuk mendanai kegiatan operasional atau kegiatan sehari-hari yang dibuat untuk jangka waktu per tahun. Anggaran operasional termasuk kedalam jenis pengeluaran kecil yang bersifat rutin dan tidak menambah fungsi aset. Sedangkan anggaran modal merupakan anggaran yang digunakan untuk membelanjakan aktiva tetap atau pengeluaran yang bersifat jangka panjang. Anggaran modal akan menambah fungsi aset dan memiliki manfaat lebih dari satu tahun anggaran.

2. Anggaran Tentatif dan Anggaran *Enacted*

Anggaran tentatif merupakan anggaran yang muncul disebabkan oleh kegiatan yang tidak direncanakan. Oleh karena itu, anggaran tentatif tidak membutuhkan

pengesahan dari lembaga legislatif. Berbeda dengan anggaran tentatif, anggaran *enacted* merupakan anggaran yang disebabkan oleh kegiatan yang sudah direncanakan sebelumnya. Legislatif akan membahas anggaran untuk mempertimbangkan berbagai hal sebelum akhirnya menyetujui anggaran tersebut.

3. Anggaran Dana Umum dan Anggaran Dana Khusus

Anggaran dana umum dalam sektor publik bertujuan untuk membiayai program atau kegiatan sehari-hari yang bersifat umum. Sedangkan anggaran dana khusus merupakan anggaran yang digunakan untuk kegiatan atau program khusus yang memiliki tujuan tertentu.

4. Anggaran Tetap dan Anggaran Fleksibel

Jumlah anggaran tetap ditentukan pada awal tahun anggaran. Begitupun juga dengan anggaran fleksibel yang telah menetapkan barang jasa atau unit pada awal tahun. Perbedaan keduanya terdapat pada ketentuan jumlah anggarannya. Jumlah pada anggaran tetap tidak boleh melampaui ketentuan pada tahun anggaran yang telah ditetapkan meskipun dalam prosesnya terdapat peningkatan jumlah kegiatan. Sedangkan pada anggaran fleksibel, jumlah anggaran dapat meningkat atau menurun sejalan dengan jumlah kegiatan yang direncanakan.

2.3.4 Penyerapan Anggaran

Penyerapan anggaran dalam satuan kerja bermakna sebagai proporsi anggaran yang telah dicairkan atau direalisasikan dalam satu tahun anggaran (Noviwijaya dan Rahman, 2013). Sedangkan Halim (2014) mengatakan

penyerapan anggaran adalah pencapaian dari estimasi jumlah yang hendak dicapai dalam jumlah yang terealisasi. Pada siklus anggaran, proses penyerapan anggaran terjadi setelah proses perencanaan, penetapan, dan pengesahan anggaran (Kuncoro, 2013). Dalam sektor publik, besaran penyerapan anggaran tercermin dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang dibuat setiap tahun anggaran.

Penyerapan anggaran memiliki pengaruh yang besar dalam laju pertumbuhan ekonomi (Mardiasmo, 2009). Untuk merealisasikan pembangunan nasional sebagai upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi, pemerintah hendaknya dapat mengatur pengeluaran. Sebagai ukuran keberhasilan penyerapan anggaran, seharusnya terdapat tolok ukur yang digunakan untuk mengetahui apakah anggaran berjalan berhasil diserap dengan baik atau tidak. Namun, sampai saat ini belum ada standar definisi baku mengenai persen serapan yang masuk dalam kategori penyerapan anggaran yang minim. Akan tetapi, Arif dan Halim (2013) menyebutkan bahwa beberapa daerah yang memiliki pakta integritas dan ditandatangani kepala satuan kerja, pemerintah dikatakan minim dalam hal penyerapan anggaran apabila tidak mampu merealisasikan 90 persen dari total anggaran sampai dengan akhir tahun.

2.4 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran

2.4.1 Perencanaan Anggaran

Perencanaan bermakna sebagai proses yang digunakan untuk menentukan tindakan di masa depan sebelum suatu kegiatan akan dilakukan. Dalam menentukan tujuan sebuah organisasi, perencanaan dilakukan dengan menggunakan strategi dan taktik sebagai upaya pencapaian tujuan (Suandy, 2011). Munandar (2013)

mendefinisikan anggaran sebagai sebuah rencana sistematis dalam satuan moneter yang berisi berbagai kegiatan organisasi dan berlaku pada periode tertentu. Anggaran berfungsi sebagai petunjuk perkiraan ekspektasi pengeluaran dan pendapatan dalam periode tertentu (Bastian, 2019). Berdasarkan beberapa definisi yang sudah disebutkan, maka dapat dikatakan, perencanaan anggaran dapat diartikan cara mendapatkan uang serta mengalokasikannya dengan tujuan agar penggunaan dana di masa depan tepat sasaran (Salwah, 2019). Ramdhani dan Anisa (2017) menyatakan bahwa perencanaan anggaran berpengaruh positif signifikan terhadap penyerapan anggaran. Hal tersebut menjadi wajar karena diperlukan perencanaan yang matang untuk mencapai serapan anggaran yang maksimal.

2.4.2 Komitmen Organisasi

Komitmen didefinisikan sebagai keadaan dimana seseorang dalam organisasi berpihak secara penuh dengan tujuan mempertahankan eksistensinya (Robbins dan Judge, 2007). Komitmen organisasi bermakna sejauh mana seseorang dalam organisasinya berusaha untuk mempertahankan keberadaannya (Lubis, 2010). Lubis (2010) mengatakan komitmen organisasi dapat terbangun apabila seseorang dalam organisasi memiliki dan dapat mengembangkan sikap yakni yang berhubungan dengan identifikasi, keterlibatan, dan loyalitas. Sikap identifikasi menggambarkan seseorang yang paham terhadap tujuan organisasi. Keterlibatan berkaitan dengan anggapan seseorang yang merasa senang dalam melakukan suatu pekerjaan dalam organisasi yang bersangkutan. Sedangkan loyalitas memberi makna seseorang yang memiliki perasaan bahwa organisasi merupakan tempat bekerja dan tempat tinggal. Putri *et al.*, (2017) menemukan bahwa komitmen

organisasi memiliki pengaruh positif signifikan terhadap penyerapan anggaran. Kurang efektifnya pengawasan dalam pelaksanaan anggaran menjadi gambaran bahwa komitmen sebuah organisasi minim pula. Hal tersebut pada akhirnya akan berdampak kuat pada penyerapan anggaran.

2.4.3 Regulasi

Regulasi merupakan kaidah yang dibuat untuk mengatur petunjuk yang dipakai untuk membuat sesuatu hal lebih terorganisir serta mengandung ketentuan yang harus dipatuhi (Bastian, 2010). Dalam organisasi sektor publik, regulasi digunakan untuk merealisasikan kebijakan serta sebagai alat untuk menghadapi problema yang ada. Pegawai harus mematuhi regulasi dalam melakukan implementasi berbagai kegiatan sehingga dalam hal ini regulasi memiliki pengaruh terhadap penganggaran. Sebuah dilema ketika disatu sisi pegawai harus mematuhi segala aturan yang ada, sementara aturan yang muncul terkadang berubah secara cepat yang mengakibatkan pelaksanaan setiap kegiatan dapat terkendala. Salah satu kendala berkaitan dengan pengaruh regulasi terhadap penyerapan anggaran. Ramadhani dan Setiawan (2019) menyatakan bahwa regulasi berpengaruh secara positif signifikan terhadap penyerapan anggaran. Ketidakmerataan penyerapan anggaran dimungkinkan terjadi pada pemerintah dikarenakan efek dari adanya perubahan regulasi.

2.4.4 Pemahaman Sistem Prosedur Pengelolaan Keuangan

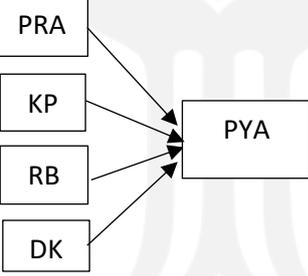
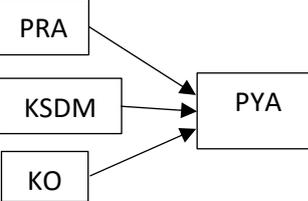
Berdasarkan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007, sistem akuntansi keuangan daerah merupakan serangkaian prosedur yang dimulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, hingga pelaporan keuangan. Sedangkan

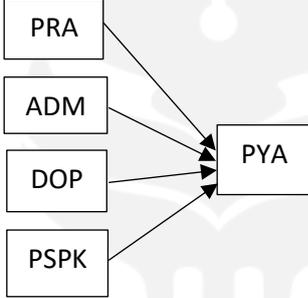
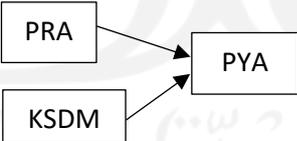
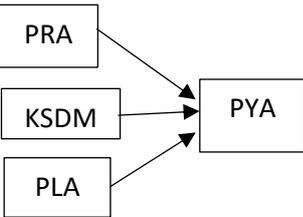
pengelolaan keuangan daerah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 merupakan seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Makna pemahaman sistem prosedur pengelolaan keuangan berkaitan dengan seorang pegawai yang dalam mengelola keuangan daerah dituntut paham akan sistem akuntansi keuangan daerah yang berlaku guna pembuatan laporan keuangan (Widiawati, 2019). Widiawati (2019) juga menyebutkan bahwa pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah merupakan aktivitas jasa sebagai penyedia informasi untuk pengambilan keputusan dan pengelolaan dana. Widiawati (2019) menemukan pemahaman sistem akuntansi daerah berpengaruh positif signifikan terhadap pengelolaan keuangan yang mana berkaitan dengan penganggaran. Hal tersebut dikarenakan anggaran merupakan perwujudan dari pengelolaan keuangan. Penyerapan anggaran yang menjadi salah satu tahapan penganggaran secara otomatis dapat terpengaruh oleh pemahaman sistem prosedur pengelolaan keuangan.

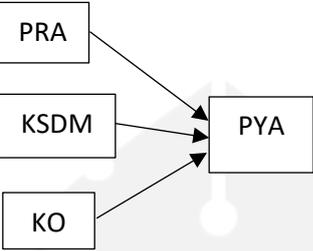
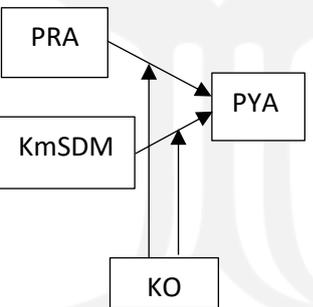
2.5 Penelitian Terdahulu

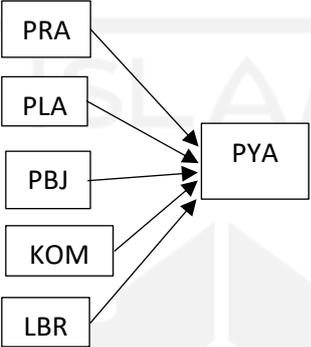
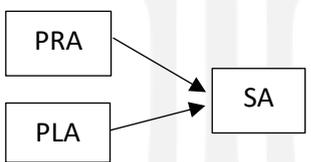
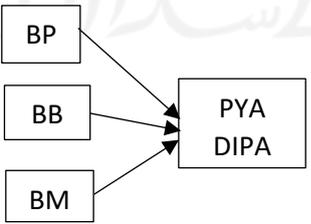
Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

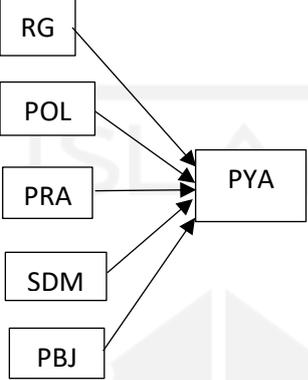
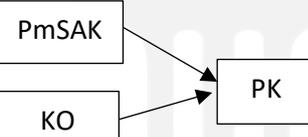
No	Penelitian	Variabel Penelitian	Metode, Sampel, Alat Analisis, Teori	Hasil Penelitian
1	Seftianova dan Adam (2013)	<pre> graph LR KDIPA --> TPYA KDIPA --> PPYA APK --> TPYA APK --> PPYA </pre>	<ul style="list-style-type: none"> • Kuantitatif • 160 Satker KPPN Malang 	<ul style="list-style-type: none"> • Kualitas DIPA berpengaruh positif terhadap tingkat penyerapan

No	Penelitian	Variabel Penelitian	Metode, Sampel, Alat Analisis, Teori	Hasil Penelitian
			<ul style="list-style-type: none"> • Linier berganda – SPSS 	anggaran dan proporsionalitas penyerapan anggaran antar periode. <ul style="list-style-type: none"> • Akurasi perencanaan kas berpengaruh positif terhadap tingkat penyerapan anggaran dan proporsionalitas penyerapan anggaran antar periode.
2	Utomo dan Mulyanto (2014)	 <pre> graph LR PRA --> PYA KP --> PYA RB --> PYA DK --> PYA </pre>	<ul style="list-style-type: none"> • Kuantitatif • 108 Satker KPPN Klaten • Linier berganda – SPSS 	Perencanaan anggaran, reformasi birokrasi, dan disiplin kerja berpengaruh secara positif signifikan terhadap penyerapan anggaran. Sedangkan untuk variabel kompetensi pegawai berpengaruh positif tidak signifikan.
3	Alumbida <i>et al.</i> (2016)	 <pre> graph LR PRA --> PYA KSDM --> PYA KO --> PYA </pre>	<ul style="list-style-type: none"> • Kuantitatif • 27 SKPD Kabupaten Kepulauan Talaud 	Perencanaan anggaran berpengaruh positif signifikan terhadap penyerapan anggaran. Sedangkan variabel kapasitas

No	Penelitian	Variabel Penelitian	Metode, Sampel, Alat Analisis, Teori	Hasil Penelitian
			<ul style="list-style-type: none"> • Linier berganda – SPSS • Teori institusional, <i>stewardship theory</i>, <i>social learning theory</i>. 	SDM dan komitmen organisasi berpengaruh positif secara tidak signifikan terhadap penyerapan anggaran.
4	Muhammad (2016)		<ul style="list-style-type: none"> • Kuantitatif • SKPD Pemda Yogyakarta sebanyak 43 responden • Linier berganda – SPSS • Teori birokrasi 	Perencanaan anggaran, administrasi, dokumen pengadaan, dan pemahaman sistem dan pengelolaan keuangan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap penyerapan anggaran.
5	Zarinah <i>et al.</i> (2016)		<ul style="list-style-type: none"> • Kuantitatif • SKPD Pemda Kabupaten Aceh Utara • Linier berganda – SPSS 	Perencanaan anggaran dan kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran.
6	Ramdhani dan Anisa (2017)		<ul style="list-style-type: none"> • Kuantitatif • 15 OPD Provinsi Banten • Linier berganda – SPSS 	Perencanaan anggaran, kualitas sumber daya manusia, dan pelaksanaan anggaran berpengaruh positif signifikan terhadap

No	Penelitian	Variabel Penelitian	Metode, Sampel, Alat Analisis, Teori	Hasil Penelitian
			<ul style="list-style-type: none"> • <i>Agency theory</i> dan <i>goal setting theory</i> 	penyerapan anggaran.
7	Putri <i>et al.</i> (2017)	 <pre> graph LR PRA --> PYA KSDM --> PYA KO --> PYA </pre>	<ul style="list-style-type: none"> • Kuantitatif • 16 SKPD Pemda Provinsi Bali • Linier berganda – SPSS • <i>Goal setting theory</i> 	Perencanaan anggaran, kualitas sumber daya manusia, dan komitmen organisasi memiliki pengaruh positif signifikan terhadap penyerapan anggaran.
8	Dewi <i>et al.</i> (2017)	 <pre> graph LR PRA --> PYA KmSDM --> PYA KO --> PYA </pre>	<ul style="list-style-type: none"> • Kuantitatif • 41 SKPD Pemerintah Kabupaten Tabanan • Linier berganda – SPSS • <i>Goal setting theory</i> 	Perencanaan anggaran berpengaruh positif signifikan terhadap penyerapan anggaran, sedangkan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh negatif signifikan terhadap penyerapan anggaran. Variabel komitmen organisasi tidak memperkuat perencanaan anggaran pada penyerapan anggaran namun memperkuat kompetensi sumber daya manusia pada

No	Penelitian	Variabel Penelitian	Metode, Sampel, Alat Analisis, Teori	Hasil Penelitian
				penyerapan anggaran.
9	Elim <i>et al.</i> (2018)	 <pre> graph LR PRA --> PYA PLA --> PYA PBJ --> PYA KOM --> PYA LBR --> PYA </pre>	<ul style="list-style-type: none"> • Kuantitatif • PPK, PPTK, PPSPM, dan bendahara pengeluaran di seluruh OPD Kota Kupang • Linier berganda – SPSS • <i>Agency theory</i> 	Perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, komitmen organisasi, dan lingkungan birokrasi.
10	Salwah (2019)	 <pre> graph LR PRA --> SA PLA --> SA </pre>	<ul style="list-style-type: none"> • Kuantitatif • SKPD Pemerintah Kota Banda Aceh sebanyak 78 responden • Linier berganda – SPSS 	Perencanaan anggaran berpengaruh positif signifikan terhadap serapan anggaran, sedangkan pelaksanaan anggaran berpengaruh parsial positif signifikan.
11	Ratag <i>et al.</i> (2019)	 <pre> graph LR BP --> PYA_DIPA BB --> PYA_DIPA BM --> PYA_DIPA </pre>	<ul style="list-style-type: none"> • Kuantitatif • Lingkungan Pegawai Universitas Sam Ratulangi Manado • Linier berganda – Excel dan <i>EViews</i> 	Belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal berpengaruh positif signifikan terhadap penyerapan anggaran DIPA.

No	Penelitian	Variabel Penelitian	Metode, Sampel, Alat Analisis, Teori	Hasil Penelitian
12	Ramadhani dan Setiawan (2019)	 <pre> graph LR RG --> PYA POL --> PYA PRA --> PYA SDM --> PYA PBJ --> PYA </pre>	<ul style="list-style-type: none"> • Kuantitatif • 39 OPD Provinsi Sumatera Barat • Linier berganda – SPSS • Teori stakeholder, teori anggaran, dan teori penyerapan anggaran 	Regulasi, perencanaan anggaran, dan pengadaan barang dan jasa berpengaruh positif signifikan terhadap penyerapan anggaran belanja. Sedangkan politik anggaran dan sumber daya manusia tidak berpengaruh positif signifikan terhadap penyerapan anggaran belanja.
13	Widiawati (2019)	 <pre> graph LR PmSAK --> PK KO --> PK </pre>	<ul style="list-style-type: none"> • Kuantitatif • 14 SKPD Kota Samarinda • <i>Partial Least Square</i> (PLS) 	Pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah dan komitmen organisasi berpengaruh positif signifikan terhadap pengelolaan keuangan.

*Keterangan:

- KDIPA : Kualitas DIPA
- APK : Akurasi Perencanaan Kas
- TPYA : Tingkat Penyerapan Anggaran
- PPYA : Proporsionalitas Penyerapan Anggaran antar Periode
- PRA : Perencanaan Anggaran
- KP : Kompetensi Pegawai
- RB : Reformasi Birokrasi
- DK : Disiplin Kerja
- PYA : Penyerapan Anggaran
- KSDM : Kapasitas SDM atau Kualitas SDM
- KO : Komitmen Organisasi
- ADM : Administrasi

- DOP : Dokumen Pengadaan
- PSPK : Pemahaman Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan
- KmSDM : Kompetensi SDM
- PLA : Pelaksanaan Anggaran
- PBJ : Pengadaan Barang dan Jasa
- LBR : Lingkungan Birokrasi
- SA : Serapan Anggaran
- BP : Belanja Pegawai
- BB : Belanja Barang
- BM : Belanja Modal
- PYA DIPA : Penyerapan Anggaran DIPA
- RG : Regulasi
- POL : Politik Anggaran
- SDM : Sumber Daya Manusia
- PmSAK : Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah
- PK : Pengelolaan Keuangan

Dalam berbagai penelitian terdahulu, terdapat berbagai macam variabel yang diteliti, diantaranya perencanaan anggaran, komitmen organisasi, regulasi, pelaksanaan anggaran, politik anggaran, pengadaan barang dan jasa, serta pemahaman sistem dan prosedur pengelolaan keuangan. Beberapa referensi penelitian terdahulu menunjukkan metode yang dipakai adalah metode kuantitatif dengan menggunakan kombinasi data primer dan sekunder. Berkaitan dengan referensi penelitian terdahulu yang sejenis dengan topik penelitian ini, mayoritas sampel diambil dari pegawai perangkat daerah instansi lingkup pemerintah daerah atau pemerintah provinsi. Begitupun juga dengan alat ujinya, hampir seluruh referensi penelitian terdahulu yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan SPSS. Para peneliti dalam penelitian terdahulu menggunakan berbagai macam teori sebagai pendukung variabel yang digunakan. Teori tersebut diantaranya, *agency theory*, *goal setting theory*, *stewardship theory*, *social learning theory*, teori institusional, dan teori *stakeholder*.

Penelitian terdahulu menghasilkan hasil yang beragam. Secara keseluruhan, perencanaan anggaran mempunyai pengaruh secara positif signifikan terhadap penyerapan anggaran (Ramdhani dan Anisa, 2017); (Elim *et al.*, 2018). Variabel komitmen organisasi menurut (Alumbida *et al.*, 2016) memiliki pengaruh positif tidak signifikan terhadap penyerapan anggaran. Sementara pengaruh signifikan komitmen organisasi terhadap penyerapan anggaran ditemukan oleh (Putri *et al.*, 2017). Kaitannya dengan variabel moderasi, salah satu referensi penelitian terdahulu menyatakan komitmen organisasi tidak memperkuat hubungan antara perencanaan anggaran dengan penyerapan anggaran (Dewi *et al.*, 2017). Untuk variabel regulasi, terdapat hasil penelitian yang menyatakan regulasi berpengaruh positif signifikan terhadap penyerapan anggaran (Ramadhani dan Setiawan, 2019). Sedangkan untuk hasil penelitian terdahulu yang menggunakan variabel pemahaman sistem prosedur pengelolaan keuangan, Muhammad (2016) menyatakan bahwa variabel tersebut memiliki pengaruh positif signifikan terhadap penyerapan anggaran. Untuk memperkuat hubungan antara pemahaman sistem akuntansi dengan pengelolaan keuangan, Widiawati (2019) menyatakan bahwa pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh secara positif signifikan terhadap pengelolaan keuangan.

2.6 Hipotesis Penelitian

2.6.1 Pengaruh Perencanaan Anggaran terhadap Penyerapan Anggaran

Perencanaan anggaran didefinisikan sebagai cara mendapatkan uang serta mengalokasikannya dengan tujuan agar penggunaan dana di masa depan dapat tepat sasaran (Salwah, 2019). Dalam konteks pencapaian tujuan sasaran yakni

penyerapan anggaran, perencanaan yang baik merupakan penghambat permasalahan lambatnya serapan anggaran meskipun perencanaan yang baik belum tentu menghasilkan pencapaian sasaran yang baik (BPKP, 2011). Berdasarkan hubungan prinsipal-agen pada *agency theory*, dalam hal ini eksekutif sebagai agen melakukan perencanaan anggaran untuk program dan kegiatan dengan memperhatikan prioritas dan tujuan pemerintah sedangkan legislatif akan memperhatikan usulan anggaran tersebut sebelum kemudian disahkan. Perencanaan anggaran yang dilakukan dengan baik dan dipertimbangkan dengan matang akan mempengaruhi tingkat realisasi penyerapan anggaran. Ramdhani dan Anisa (2017); Elim *et al.*, (2018) menyatakan bahwa perencanaan anggaran berpengaruh positif signifikan terhadap penyerapan anggaran.

Berdasarkan penelitian terdahulu mengenai pengaruh perencanaan anggaran terhadap penyerapan anggaran seperti yang sudah dibahas di atas, maka peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H1: Perencanaan anggaran berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran.

2.6.2 Pengaruh Komitmen Organisasi terhadap Penyerapan Anggaran

Komitmen organisasi merupakan sejauh mana seseorang dalam organisasinya berusaha untuk mempertahankan keberadaannya (Lubis, 2010).

Lubis (2010) menyatakan komitmen organisasi dapat terbangun apabila seseorang dalam organisasi memiliki dan dapat mengembangkan sikap yakni yang berhubungan dengan identifikasi, keterlibatan, dan loyalitas. Berkaitan dengan *goal setting theory*, tingginya komitmen pegawai akan berpengaruh terhadap loyalitas pegawai. Ketika sebuah loyalitas timbul dari pegawai dalam suatu organisasi,

mereka akan lebih mementingkan kepentingan organisasi dan berusaha untuk mencapai tujuan organisasi yang bersangkutan salah satunya dalam hal penyerapan anggaran. Putri *et al.* (2017) menyatakan bahwa komitmen organisasi memiliki pengaruh positif signifikan terhadap penyerapan anggaran.

Berdasarkan diskusi di atas, dalam hal ini peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2: Komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran.

2.6.3 Pengaruh Regulasi terhadap Penyerapan Anggaran

Regulasi diartikan sebagai kaidah yang dibuat untuk mengatur petunjuk yang dipakai untuk membuat sesuatu hal lebih terorganisir serta mengandung ketentuan yang harus dipatuhi (Bastian, 2010). Dalam mengimplementasikan kebijakan dan menghadapi permasalahan, setiap organisasi memerlukan regulasi. Namun dalam prosesnya pelaksanaan regulasi yang ada sering menimbulkan permasalahan yaitu berkaitan dengan perubahan yang sering dilakukan. Implikasi dari perubahan regulasi yang sering terjadi berefek pada pegawai. Hal yang menjadi sorotan adalah apakah pegawai dapat cepat beradaptasi akan perubahan yang ada dengan cara memahami dan mematuhi regulasi yang ada. Mekanisme proses penganggaran akan berjalan dengan baik apabila pegawai mematuhi regulasi yang ditetapkan serta dapat memahaminya dengan baik. Ramadhani dan Setiawan (2019) menyatakan bahwa regulasi berpengaruh positif signifikan terhadap penyerapan anggaran.

Sesuai dengan pembahasan mengenai hubungan variabel regulasi dan penyerapan anggaran di atas, maka diajukan hipotesis sebagai berikut:

H3: Regulasi berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran.

2.6.4 Pengaruh Pemahaman Sistem Prosedur Pengelolaan Keuangan terhadap Penyerapan Anggaran

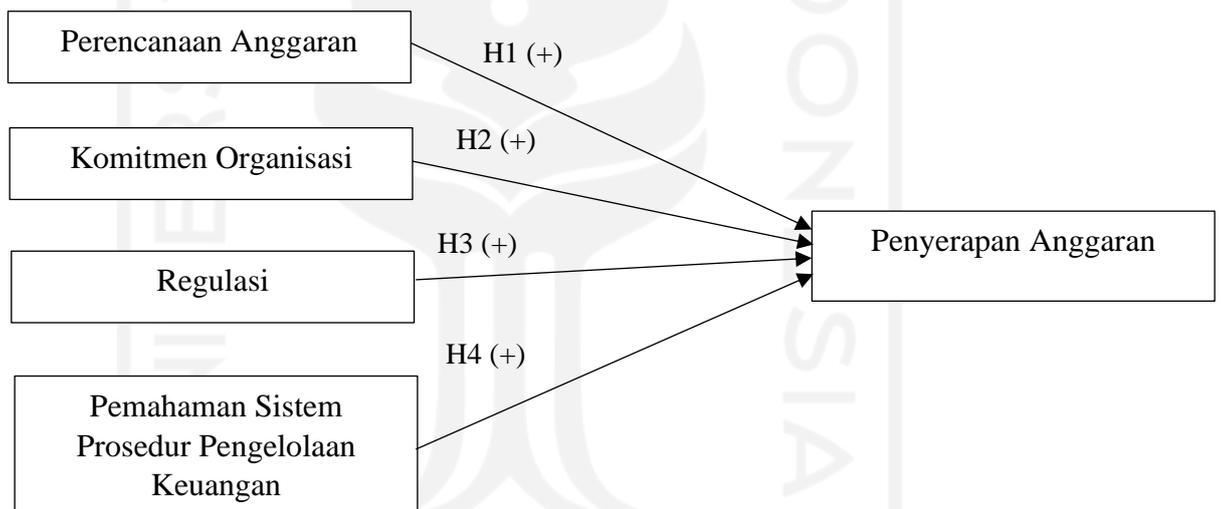
Pemahaman sistem prosedur pengelolaan keuangan berkaitan dengan seorang pegawai yang dalam mengelola keuangan daerah dituntut paham akan sistem akuntansi keuangan daerah yang berlaku guna pembuatan laporan keuangan (Widiawati, 2019). Anggaran yang menjadi perwujudan pengelolaan keuangan memerlukan usaha untuk memahaminya dengan jalan dapat mengimplementasikan ketentuan akuntansi anggaran daerah ke dalam sistem pengelolaan keuangan itu sendiri. Pemahaman sistem prosedur pengelolaan keuangan yang baik akan memberi pengaruh terhadap penyerapan anggaran. Serapan anggaran yang maksimal dapat dikarenakan oleh baiknya suatu organisasi dalam menjalankan mekanisme pengelolaan keuangan. Sedangkan kemampuan organisasi dalam mengelola keuangan berbanding lurus dengan pemahaman pegawai akan pelaporan keuangan dan sistem akuntansi yang ada. Muhammad (2016) menyatakan bahwa pemahaman sistem prosedur pengelolaan keuangan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap penyerapan anggaran. Widiawati (2019) dalam hal ini juga memperkuat pernyataan bahwa pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh secara positif signifikan terhadap pengelolaan keuangan.

Berdasarkan pembahasan yang disajikan di atas, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H4: Pemahaman sistem prosedur pengelolaan keuangan berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran.

2.7 Kerangka Penelitian

Berdasarkan hipotesis yang telah dikembangkan pada bagian sebelumnya, Gambar 2.1 berikut merepresentasikan pengaruh perencanaan anggaran, komitmen organisasi, regulasi, dan pemahaman sistem prosedur pengelolaan keuangan terhadap penyerapan anggaran.



Gambar 2. 1 Kerangka Penelitian

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Metode penelitian mencakup teknik-teknik yang digunakan dalam penelitian beserta bagaimana data dikumpulkan dan dianalisis (Kothari, 2004). Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif yang menggunakan data primer. Williams (2007) mendefinisikan penelitian kuantitatif sebagai penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antar variabel yang membentuk hasil yang bersifat prediktif, eksplanatori, atau konfirmatori. Peneliti dalam hal ini melakukan survei secara *online* dengan membagikan kuesioner via *google form*. Kuesioner ditujukan bagi pegawai perangkat daerah yang memiliki kewenangan dalam proses penganggaran dan pengelolaan keuangan daerah.

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi mewakili seluruh cakupan unit berisi atribut umum yang mana di dalamnya sampel akan dapat dipilih (Bryman, 2012). Sedangkan sampel mengacu pada bagian kecil dari kasus yang mewakili sebuah populasi (Henry, 1990). Populasi dalam penelitian ini adalah 45 Perangkat Daerah yang ada di Kabupaten Magelang. Dari 45 Perangkat Daerah di Kabupaten Magelang, responden terbagi menjadi responden dari kelompok perangkat daerah tipe A (badan dan dinas tipe A) dan perangkat daerah tipe B (kecamatan dan dinas tipe B). Untuk kriteria responden penelitian perangkat daerah tipe A, ditentukan pegawai perangkat daerah yang menduduki jabatan sebagai Kasubbag Perencanaan dan Evaluasi (Kasubbag Program), Kasubbag Keuangan, dan Bendahara Pengeluaran. Sedangkan untuk

kelompok responden penelitian perangkat daerah tipe B, ditentukan kriteria responden yang menduduki jabatan sebagai Kasubbag Program dan Keuangan serta Bendahara Pengeluaran.

Dalam menentukan sampel penelitian, peneliti menggunakan teknik sampel jenuh. Teknik sampel jenuh merupakan teknik penentuan sampel dimana semua anggota populasi digunakan sebagai sampel (Sugiyono, 2017). Dari 45 Perangkat Daerah di Kabupaten Magelang, diketahui jumlah yang ditentukan untuk menjadi sampel penelitian ini berjumlah 106 sampel. Jumlah tersebut merepresentasikan populasi dalam penelitian ini.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data primer dalam penelitian ini dilakukan dengan mendistribusikan kuesioner *online* menggunakan *googleform* ke masing-masing perangkat daerah. Kuesioner merupakan salah satu *tools* yang bertujuan untuk mengumpulkan data primer berbentuk opini, harapan, dan keinginan responden (Pujihastuti, 2010). Bentuk kuesioner terdiri dari beberapa pertanyaan tertutup yang memungkinkan responden hanya dapat mengisi pertanyaan dengan jawaban yang disediakan oleh peneliti. Dalam hal pengukuran data, peneliti mengajukan beberapa pertanyaan kemudian menyajikan enam pilihan jawaban berbentuk skala interval. Skala interval secara spesifik disajikan dalam bentuk skala likert dimulai dari skor terkecil untuk responden yang menyatakan jawaban sangat tidak setuju hingga skor terbesar untuk responden yang menjawab dengan jawaban sangat setuju. Sedangkan untuk data sekunder, peneliti menggunakan laporan realisasi anggaran pada tahun 2016 sampai dengan 2021. Aspek yang dilihat dalam laporan realisasi

anggaran ini adalah perbandingan angka penetapan anggaran dan realisasi anggaran untuk masing-masing tahun anggaran yang bersangkutan.

3.4 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Variabel penelitian merupakan berbagai variasi atribut, karakteristik, dan sifat yang memiliki nilai serta dapat menjadi simbol suatu peristiwa (Cooper dan Schindler, 2013). Berkaitan dengan makna nilai pada definisi variabel penelitian, peneliti menggunakan skala *likert*. Peneliti akan menyediakan pernyataan beserta empat pilihan dalam urutan skala, sementara responden secara bebas memilih salah satu dari pilihan jawaban. Jawaban yang dipilih akan didasari oleh persepsi responden yang bersangkutan.

Pilihan jawaban dengan nilai 1 hingga 6 berbanding lurus dengan tingkat persetujuan responden atas jawaban yang dipilih. Nilai 1 dipilih apabila responden merasa sangat tidak setuju terhadap pernyataan yang diajukan. Nilai tersebut mencerminkan tingkat persetujuan responden terhadap pernyataan yang ada bernilai rendah. Sedangkan nilai 6 akan dipilih jika responden merasa sangat setuju dengan pernyataan yang diberikan. Nilai 6 menggambarkan bahwa tingkat persetujuan responden terhadap pernyataan yang diajukan adalah bernilai tinggi.

3.4.1 Penyerapan Anggaran

Penyerapan anggaran dalam satuan kerja bermakna sebagai proporsi anggaran yang telah dicairkan atau direalisasikan dalam satu tahun anggaran (Noviwijaya dan Rahman, 2013). Pada siklus anggaran, proses penyerapan anggaran terjadi setelah proses perencanaan, penetapan, dan pengesahan anggaran

(Kuncoro, 2013). Beberapa faktor dalam proses penganggaran mungkin dapat memiliki pengaruh terhadap penyerapan. Penyerapan anggaran dalam penelitian ini merupakan variabel dependen yang akan dihubungkan dengan beberapa variabel independen penelitian yang meliputi perencanaan anggaran, komitmen organisasi, regulasi, dan pemahaman sistem prosedur pengelolaan keuangan.

Untuk mengetahui pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap penyerapan anggaran, maka peneliti mengajukan empat item pernyataan yang dikembangkan oleh Muhammad (2016); Zarinah *et al.* (2016). Item pernyataan tersebut disajikan dalam Tabel 3.1 berikut.

Tabel 3. 1 Indikator Penyerapan Anggaran

No	Indikator	Sumber
1	Perangkat Daerah Anda memiliki tingkat penyerapan anggaran pada triwulan IV lebih dari 90%	Sujai (2012); Muhammad (2016)
2	Perangkat Daerah Anda melakukan evaluasi secara berkala terkait penyerapan anggaran per triwulannya untuk dijadikan acuan perbaikan penyerapan anggaran untuk triwulan yang akan datang	
3	Penyerapan anggaran Perangkat Daerah Anda sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat	
4	Tingkat penyerapan anggaran pada Perangkat Daerah Anda naik dari tahun sebelumnya	

3.4.2 Perencanaan Anggaran

Perencanaan anggaran merupakan cara mendapatkan uang serta mengalokasikannya dengan tujuan agar penggunaan dana di masa depan tepat

sasaran (Salwah, 2019). Perencanaan anggaran yang matang membuat program kerja yang dibuat berjalan dengan lancar. Hal tersebut dapat tercapai apabila dana yang ada dapat dialokasikan pada program kerja sesuai dengan kebutuhan. Penggunaan dana yang tepat sasaran dan terealisasinya program kerja sesuai harapan mengantarkan pada maksimalnya tingkat serapan anggaran. Selain berkaitan dengan kesesuaian kebutuhan organisasi, perencanaan anggaran juga mengacu pada evaluasi program kerja tahun sebelumnya, aturan yang sesuai, ketepatan waktu, partisipatif, dan revisi atau perubahan karena kesalahan administrasi (Malahayati *et al.*, 2015).

Perencanaan anggaran ditemukan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap penyerapan anggaran (Ramdhani dan Anisa, 2017). Hal tersebut bermakna anggaran yang direncanakan dengan baik akan mengantarkan pada penyerapan anggaran yang maksimal.

Berdasarkan diskusi di atas, peneliti mengajukan empat item indikator pernyataan untuk mengetahui pengaruh perencanaan anggaran terhadap penyerapan anggaran yang dikembangkan oleh Muhammad (2016); Zarinah *et al.* (2016); Jauhari (2017). Tabel 3.2 berikut ini memuat kedelapan item indikator pernyataan.

Tabel 3. 2 Indikator Perencanaan Anggaran

No	Indikator	Sumber
1	Penetapan perencanaan anggaran Perangkat Daerah Anda selalu tepat waktu	Muhammad (2016); Zarinah <i>et al.</i> (2016); Jauhari (2017)
2	Proyek Perangkat Daerah Anda dilaksanakan sesuai dengan	

No	Indikator	Sumber
	perencanaan anggaran yang telah dibuat	
3	Perubahan anggaran diperlukan ketika perencanaan anggaran Perangkat Daerah Anda belum sesuai dengan kebutuhan	
4	Anda mampu menyusun dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sesuai dengan prosedur yang ada dengan tujuan agar perencanaan anggaran dapat terorganisir dengan baik	

3.4.3 Komitmen Organisasi

Komitmen organisasi didefinisikan sebagai keadaan dimana seseorang dalam organisasi berpihak secara penuh dengan tujuan mempertahankan eksistensinya (Robbins dan Judge, 2007). Lubis (2010) menyatakan komitmen organisasi dapat terbangun apabila seseorang dalam organisasi memiliki dan dapat mengembangkan sikap yakni yang berhubungan dengan identifikasi, keterlibatan, dan loyalitas.

Komitmen organisasi memiliki pengaruh secara positif signifikan terhadap penyerapan anggaran (Putri *et al.*, 2017). Pegawai yang memiliki komitmen yang tinggi akan berusaha semaksimal mungkin agar tujuan organisasinya tercapai. Tujuan organisasi merupakan hal-hal yang ingin dicapai oleh organisasi sejalan dengan target yang telah ditetapkan. Kaitannya dengan penganggaran, organisasi akan menetapkan target serapan anggaran dengan harapan tercapainya penyerapan anggaran yang maksimal.

Untuk mengetahui tingkat komitmen organisasi dan pengaruhnya terhadap penyerapan anggaran, peneliti mengajukan empat item pernyataan yang dikembangkan oleh Rustini *et al.* (2015); Elim *et al.* (2018). Item pernyataan tersebut disajikan dalam Tabel 3.3.

Tabel 3. 3 Indikator Komitmen Organisasi

No	Indikator	Sumber
1	Anda memiliki kepercayaan yang kuat terhadap tujuan organisasi Perangkat Daerah Anda	Rustini <i>et al.</i> (2015); Elim <i>et al.</i> (2018)
2	Anda memiliki kemauan yang kuat untuk berusaha dan bekerja keras untuk organisasi Perangkat Daerah Anda	
3	Komitmen Anda terkait pengelolaan anggaran Perangkat Daerah dipengaruhi oleh <i>Reward</i> dan <i>Punishment</i> yang diberikan kepada Anda	
4	Anda mendukung dilaksanakannya pelatihan dalam hal penganggaran dan pengelolaan keuangan	

3.4.4 Regulasi

Regulasi bermakna kaidah yang dibuat untuk mengatur petunjuk yang dipakai untuk membuat sesuatu hal lebih terorganisir serta mengandung ketentuan yang harus dipatuhi (Bastian, 2010). Kaitannya dengan sistem penganggaran, adanya regulasi memiliki peran yang penting dalam pengendalian kegiatan dan program yang dibuat. Pengendalian kegiatan dan program dalam anggaran akan ikut berperan dalam memaksimalkan penyerapan anggaran yang ada.

Ramadhani dan Setiawan (2019) menyatakan regulasi berpengaruh positif signifikan terhadap penyerapan anggaran. Pengaruh tersebut bermakna regulasi yang jelas dalam tahap penganggaran mencakup seluruh standar operasional prosedurnya memiliki hubungan yang signifikan terhadap penyerapan anggaran. Regulasi yang dapat dipatuhi dan dilaksanakan oleh pegawai akan memudahkan organisasi dalam pencapaian tujuannya. Namun, terdapat beberapa hal yang dapat mempengaruhi keberadaan regulasi di lingkungan organisasi yang meliputi perubahan aturan, waktu, serta penerapan regulasi itu sendiri dalam suatu organisasi (Ramadhani dan Setiawan, 2019).

Oleh karena itu, peneliti mengajukan empat item pernyataan yang bertujuan untuk mengetahui tingkat pengaruh regulasi terhadap penyerapan anggaran. Item-item berikut ini dikembangkan oleh (Ramadhani dan Setiawan, 2019) yang disajikan dalam Tabel 3.4.

Tabel 3. 4 Indikator Regulasi

No	Indikator	Sumber
1	Menurut Anda aturan dan regulasi mengenai mekanisme penganggaran sering mengalami perubahan	Ramadhani dan Setiawan (2019)
2	Anda dapat memahami aturan dan regulasi mengenai mekanisme penganggaran Perangkat Daerah	
3	Perubahan aturan dan regulasi mengenai mekanisme penganggaran yang cepat dengan ketersediaan waktu yang sedikit dapat menyebabkan kendala dalam mengimplementasikan kegiatan pada Perangkat Daerah Anda	

No	Indikator	Sumber
4	Aturan dan regulasi mengenai mekanisme penganggaran pada perangkat daerah Anda dapat diterapkan dengan baik	

3.4.5 Pemahaman Sistem Prosedur Pengelolaan Keuangan

Pemahaman sistem prosedur pengelolaan keuangan bermakna seorang pegawai yang dalam mengelola keuangan daerah dituntut paham akan sistem akuntansi keuangan daerah yang berlaku guna pembuatan laporan keuangan (Widiawati, 2019). Pemahaman berguna untuk beberapa hal terkait penganggaran, antara lain penyusunan dokumen yang dibutuhkan terkait proses penganggaran, cara pencatatan untuk tujuan pelaporan, dan *monitoring* pelaksanaan kegiatan (Muhammad, 2016).

Muhammad (2016) menyatakan bahwa pemahaman sistem prosedur pengelolaan keuangan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap penyerapan anggaran. Pemahaman sistem prosedur pengelolaan keuangan yang baik menggambarkan arah positif terhadap penyerapan anggaran. Terdapat beberapa indikator yang menggambarkan hubungan pemahaman sistem prosedur pengelolaan keuangan yang dikembangkan oleh (Muhammad, 2016). Empat indikator tersebut disajikan dalam pernyataan yang terdapat pada Tabel 3.5 berikut.

Tabel 3. 5 Indikator Pemahaman Sistem Prosedur Pengelolaan Keuangan

No	Indikator	Sumber
1	Anda mampu menyusun Rencana Kerja dan Anggaran dan Laporan Pertanggungjawaban untuk setiap periode yang dibutuhkan pada Perangkat Daerah terkait	Muhammad (2016)

No	Indikator	Sumber
2	Anda mampu melakukan pencatatan setiap transaksi keuangan yang terjadi sesuai ketentuan yang berlaku pada Perangkat Daerah terkait	
3	Anda mampu memahami sistem akuntansi keuangan daerah dalam bentuk pelaporan akuntansi yang meliputi pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran, serta pelaporan data keuangan	
4	Anda mampu memahami unsur pengendalian internal yang dimaksudkan untuk <i>monitoring</i> pelaksanaan kegiatan pada Perangkat Daerah Anda	

3.5 Metode Analisis

Setelah data primer pada penelitian ini diperoleh dari responden, langkah selanjutnya yakni melakukan analisis terhadap data tersebut. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda. Adapun alat bantu yang digunakan untuk menganalisis yaitu SPSS (*Statistical Package for Social Science*). Nantinya hasil yang ada akan digunakan untuk membuktikan hipotesis yang diajukan oleh peneliti. Analisis data yang dilakukan mencakup beberapa poin yang akan diuraikan pada penjelasan berikut ini.

3.5.1 Uji Validitas

Ghozali (2018) mendefinisikan uji validitas sebagai uji yang digunakan untuk mengukur kevalidan indikator dalam suatu kuesioner penelitian. Tingkat validitas sebuah kuesioner dilihat dari pertanyaan yang disajikan. Pertanyaan harus dapat mengungkapkan informasi terhadap apa yang akan diukur dalam isi kuesioner.

Hal tersebut dapat terukur dengan menggunakan perbandingan r hitung dengan r tabel dengan asumsi *degree of freedom* (df)= $N-2$. Indikator dalam kuesioner akan valid apabila hasil perbandingan bernilai positif atau r hitung lebih besar daripada r tabel. Apabila hasil perbandingan tersebut negatif atau r hitung lebih kecil daripada r tabel maka indikator dalam kuesioner dapat dikatakan tidak valid. Perbandingan tersebut menggunakan kriteria tarif signifikan dengan besaran 5% atau 0,05.

3.5.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas merupakan uji yang digunakan untuk mengukur tingkat reliabilitas indikator kuisisioner penelitian. Suatu indikator dikatakan *reliable* apabila jawaban responden atas pertanyaan yang diajukan konsisten. Metode yang digunakan dalam penentuan tingkat reliabilitas yaitu menggunakan uji *Cronbach Alpha* dengan tujuan menguji hubungan antar indikator. Output uji *Cronbach Alpha* dapat dikatakan reliabel apabila suatu indikator atau konstruk bernilai *Cronbach Alpha* $> 0,70$ (Ghozali, 2018).

3.5.3 Uji Asumsi Klasik

3.5.3.1 Uji Normalitas

Uji normalitas merupakan uji yang bertujuan untuk mengetahui apakah data variabel penelitian merupakan data yang terdistribusi secara normal atau tidak. Uji tersebut salah satunya dapat dilakukan dengan melakukan uji *One Sample Kolmogorov Smirnov* dengan asumsi nilai signifikansi atau *Asymp Sig (2-tailed)* diatas 5% atau 0,05 untuk data yang berdistribusi normal. Sebaliknya, apabila nilai signifikansi atau *Asymp Sig (2-tailed)* yang didapatkan kurang dari 5% atau 0,05 maka dapat disimpulkan data tidak terdistribusi secara normal (Ghozali, 2018).

3.5.3.2 Uji Multikolinearitas

Ghozali (2018) menyatakan uji multikolinearitas merupakan uji yang bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya korelasi atau hubungan antar variabel independen. Multikolinearitas dapat diketahui dengan melakukan uji *Variance Influence Factor* (VIF). Tidak terdapatnya multikolinearitas harus memenuhi syarat dimana nilai tolerance $> 0,10$ atau $VIF < 10$. Model penelitian yang baik seharusnya bebas dari multikolinearitas atau tidak ada korelasi antar variabel independennya.

3.5.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya ketidaksamaan varians residual antar pengamatan. Pengamatan yang berbeda pada variance residual mencerminkan hasil yang diharapkan dalam penelitian. Uji heteroskedastisitas menggunakan uji Glejser dengan meregresi antar variabel independen dan nilai residualnya. Heteroskedastisitas tidak terjadi apabila nilai signifikansi antara variabel independen dengan nilai residualnya lebih dari 5% atau 0,05. Hasil analisis heteroskedastisitas dapat dicerminkan dengan pola yang diinterpretasikan dalam *scatter plot*. Pola yang teratur membentuk pola tertentu mengindikasikan adanya heteroskedastisitas. Sedangkan hasil yang baik akan menghasilkan bentuk pola yang menyebar secara tidak teratur pada posisi atas dan bawah angka nol (sumbu y) (Ghozali, 2018).

3.5.4 Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda merupakan analisis yang digunakan untuk mengetahui besar atau tidaknya pengaruh variabel independen terhadap variabel

dependen beserta arahnya (Ghozali, 2018). Dalam penelitian ini analisis regresi linear berganda akan berguna untuk mengetahui pengaruh Perencanaan Anggaran (PRA), Komitmen Organisasi (KO), Regulasi (REG), dan Pemahaman Sistem Prosedur Pengelolaan Keuangan (PSPK) terhadap Penyerapan Anggaran (PYA). Melalui analisis ini, dapat diketahui ketergantungan variabel dependen dengan satu atau variabel independen.

Rumus regresi yang digunakan pada penelitian ini yakni:

$$Y_i = f(X_i, \beta) + e_i$$

$$PYA = \beta_0 + \beta_1 PRA + \beta_2 KO + \beta_3 REG + \beta_4 PSPK + e$$

Keterangan :

β_0 = konstanta

PRA = Perencanaan Anggaran

KO = Komitmen Organisasi

REG = Regulasi

PSPK = Pemahaman Sistem Prosedur Pengelolaan Keuangan

PYA = Penyerapan Anggaran

$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ = Koefisien regresi untuk PRA, KO, REG, PSPK

e = error

3.5.5 Uji Statistik F

Uji statistik F dilakukan untuk menunjukkan kelayakan pada model penelitian. Uji F bertujuan untuk mengetahui apakah variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018). Uji F digunakan juga untuk menilai kelayakan model regresi yang telah terbentuk. Pengujian yang

dilakukan pada penelitian ini menggunakan tingkat signifikansi 0,05. Model akan dikatakan layak apabila nilai signifikansi yang dihasilkan $< 0,05$. Sebaliknya, apabila model regresi memiliki nilai signifikansi $> 0,05$, maka dapat disimpulkan model tersebut tidak layak.

3.5.6 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi adalah uji yang digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variabel dependen (Ghozali, 2018). Uji ini memungkinkan peneliti menilai kekuatan hubungan antar variabel dependen numerik dengan variabel independen numerik. Nilai koefisien determinasi berada diantara nol dan satu. Nilai satu menggambarkan persamaan prediktor yang sempurna, nilai 0,5 menggambarkan prediksi hanya mampu dilakukan sebesar 50%, dan nilai 0 yang berarti jika prediksi menunjukkan tidak terdapat variasi (Saunders *et al.*, 2009).

3.5.7 Uji Statistik T

Uji Statistik T menunjukkan seberapa besar pengaruh masing-masing variabel independen dalam menerangkan variabel dependen (Ghozali, 2018). Uji tersebut dilakukan dengan melihat nilai signifikansi yakni 0,05 atau $\alpha = 5\%$. Apabila nilai signifikan $> 0,05$ maka hipotesis ditolak, yang berarti variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Sebaliknya, jika nilai signifikan yang didapat $< 0,05$ maka hipotesis diterima, yang berarti variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

BAB IV

ANALISIS DATA DAN HASIL PENELITIAN

4.1 Proses dan Hasil Pengumpulan Data

Seperti yang sudah dijelaskan dalam bab 3 bahwa pengumpulan data penelitian dilakukan dengan menyebarkan kuesioner *google form* kepada masing-masing perangkat daerah. Sebelum penyebaran kuesioner dilakukan, peneliti mengurus perizinan penelitian terlebih dahulu ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Magelang pada tanggal 1 Desember 2021. Setelah perizinan didapatkan, peneliti kemudian melakukan penyebaran kuesioner pada tanggal 13 Desember – 24 Desember 2021.

Total kuesioner yang dibagikan untuk 45 perangkat daerah di Kabupaten Magelang berjumlah 106 kuesioner. Jumlah kuesioner yang dibagikan untuk masing-masing perangkat daerah disesuaikan berdasarkan tipe perangkat daerah terkait. Untuk tipe perangkat daerah A (badan dan dinas tipe A) kuesioner yang dibagikan per masing-masing perangkat daerah adalah 3 kuesioner. Sedangkan untuk tipe perangkat daerah B (kecamatan dan dinas tipe B), kuesioner yang dibagikan berjumlah 2 kuesioner. Peneliti dalam hal ini memberikan kesempatan waktu selama 1 minggu untuk batas waktu pengumpulan kuesioner. Namun dikarenakan berbagai sebab, seperti terdapat pegawai yang sedang melakukan perjalanan dinas dan pegawai yang menemukan kendala saat melakukan pengisian kuesionernya, peneliti baru mendapatkan seluruh hasil pengumpulan kuesioner pada tanggal 24 Desember 2021. Berdasarkan perhitungan jumlah kuesioner yang kembali, diketahui seluruh kuesioner yang dibagikan berhasil kembali secara penuh

yakni berjumlah 106 kuesioner (100%). Hasil pengumpulan data yang didapat diinterpretasikan dalam Tabel 4.1 berikut.

Tabel 4. 1 Hasil Pengumpulan Data

Keterangan	Jumlah	Persentase
Kuesioner yang dibagikan	106	100%
Kuesioner yang kembali	106	100%
Kuesioner yang tidak kembali	0	0%
Kuesioner yang memenuhi syarat	106	100%
Kuesioner yang tidak memenuhi syarat	0	0%

Sumber: Data Primer Diolah, 2021.

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh beberapa klasifikasi berdasarkan karakteristik umum responden yang meliputi jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, asal instansi, jabatan di unit kerja, lama menjabat, dan lama bekerja. Tabel 4.2 berikut menggambarkan rekapitulasi responden berdasarkan jenis kelamin.

Tabel 4. 2 Rekapitulasi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah Responden	Persentase
Laki-Laki	35	33%
Perempuan	71	67%
Total	100	100%

Sumber: Data Primer Diolah, 2021.

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan mayoritas responden adalah berjenis kelamin perempuan dengan jumlah 71 orang (67%). Sedangkan responden laki-laki berjumlah 35 orang (33%). Selanjutnya, rekapitulasi juga dilakukan berdasarkan usia responden. Tabel 4.3 berikut menggambarkan rekapitulasi responden berdasarkan usia responden.

Tabel 4. 3 Rekapitulasi Responden Berdasarkan Usia Responden

Usia Responden	Jumlah Responden	Persentase
< 30 tahun	4	4%
30 – 35 tahun	7	7%
36 – 40 tahun	11	10%
41 – 45 tahun	27	25%
46 – 50 tahun	20	19%
51 – 55 tahun	27	25%
> 55 tahun	10	9%
Total	106	100%

Sumber: Data Primer Diolah, 2021.

Berdasarkan tabel 4.3, sebaran data usia responden dibagi menjadi tujuh kelompok. Mayoritas responden pada penelitian ini berusia 40 tahun hingga 55 tahun. Jumlah mayoritas usia tersebut terlihat pada persentase tertinggi dari tabel di atas yaitu 25% untuk responden berusia diantara 41 tahun hingga 45 tahun serta 51 tahun hingga 55 tahun. Rekapitulasi berikutnya dilakukan berdasarkan tingkat pendidikan responden. Tabel 4.4 berikut menjelaskan mengenai rekapitulasi responden berdasarkan tingkat pendidikan.

Tabel 4. 4 Rekapitulasi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Jumlah Responden	Persentase
S1	43	41%
S2	29	27%
S3	0	0%
Lainnya	34	32%
Total	106	100%

Sumber: Data Primer Diolah, 2021

Berdasarkan tabel di atas, jumlah tertinggi responden yang didasarkan oleh tingkat pendidikan terakhir responden adalah responden yang memiliki pendidikan terakhir S1 yaitu berjumlah 43 responden (41%). Sedangkan untuk responden dengan tingkat pendidikan terakhir S2 jumlah yang dihasilkan yakni 29 responden (27%). Dalam hal ini, tidak ada responden yang memiliki pendidikan terakhir S3.

Namun, menurut data yang diperoleh terdapat 34 responden yang memilih lainnya. Artinya responden yang memiliki pendidikan terakhir diluar S1,S2, ataupun S3 berjumlah 34 responden (32%). Rekapitulasi selanjutnya bertujuan untuk mengetahui jumlah responden berdasarkan instansi atau perangkat daerah tempat responden bekerja. Rekapitulasi tersebut digambarkan oleh Tabel 4.5 berikut.

Tabel 4. 5 Rekapitulasi Responden Berdasarkan Instansi/Perangkat Daerah Tempat Responden Bekerja

Instansi/Perangkat Daerah	Jumlah Responden	Persentase
Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah	3	3%
Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	3	3%
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	3	3%
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3	3%
Sekretariat DPRD	3	3%
Dinas Peternakan dan Perikanan	3	3%
Dinas Pertanian dan Pangan	3	3%
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3	3%
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3	3%
Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga	3	3%
Dinas Lingkungan Hidup	3	3%
Dinas Kesehatan	3	3%
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	3	3%
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	3	3%
Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3	3%
Inspektorat	3	3%
Dinas Komunikasi dan Informatika	2	2%
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	2	2%
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2	2%
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	2	2%
Dinas Perhubungan	2	2%
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2	2%
Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran	2	2%
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2	2%
Kecamatan Srumbung	2	2%
Kecamatan Ngluwar	2	2%
Kecamatan Salam	2	2%
Kecamatan Dukun	2	2%

Instansi/Perangkat Daerah	Jumlah Responden	Persentase
Kecamatan Sawangan	2	2%
Kecamatan Muntilan	2	2%
Kecamatan Mungkid	2	2%
Kecamatan Borobudur	2	2%
Kecamatan Tempuran	2	2%
Kecamatan Kajoran	2	2%
Kecamatan Salaman	2	2%
Kecamatan Kaliangkrik	2	2%
Kecamatan Bandongan	2	2%
Kecamatan Windusari	2	2%
Kecamatan Secang	2	2%
Kecamatan Grabag	2	2%
Kecamatan Ngablak	2	2%
Kecamatan Pakis	2	2%
Kecamatan Tegalrejo	2	2%
Kecamatan Candimulyo	2	2%
Kecamatan Mertoyudan	2	2%
Total	106	100%

Sumber: Data Primer Diolah, 2021.

Berdasarkan tabel di atas, terdapat 16 Perangkat Daerah yang memiliki jumlah responden dengan persentase 3%. 16 Perangkat Daerah tersebut merupakan Perangkat Daerah Tipe A. Sedangkan 29 Perangkat Daerah lainnya yang merupakan Perangkat Daerah Tipe B memiliki jumlah persentase responden 2%. Berikutnya, dijelaskan rekapitulasi responden yang dilakukan berdasarkan jabatan responden pada unit kerjanya masing-masing. Rekapitulasi tersebut dijelaskan oleh Tabel 4.6 berikut.

Tabel 4. 6 Rekapitulasi Responden Berdasarkan Jabatan pada Unit Kerja

Jabatan pada Unit Kerja sebagai	Jumlah Responden	Persentase
Kasubbag Perencanaan dan Evaluasi	16	15%
Kasubbag Keuangan	16	15%
Kasubbag Program dan Keuangan	29	27%
Bendahara Pengeluaran	45	42%
Total	106	100%

Sumber: Data Primer Diolah, 2021.

Berdasarkan tabel di atas, diketahui terdapat 16 responden yang memiliki jabatan pada unit kerja sebagai Kasubbag Perencanaan dan Evaluasi (15%). Responden dengan jabatan sebagai Kasubbag Keuangan memiliki jumlah yang sama yaitu 16 responden (15%). Jumlah responden terbanyak menurut jabatan unit kerja adalah 29 responden yakni responden yang menduduki jabatan sebagai Bendahara Pengeluaran (42%). Sedangkan sisanya merupakan responden yang memiliki jabatan sebagai Kasubbag Program dan Keuangan yaitu berjumlah 29 responden (27%). Rekapitulasi selanjutnya dilakukan berdasarkan lama menjabat responden. Tabel 4.7 berikut menggambarkan rekapitulasi tersebut.

Tabel 4. 7 Rekapitulasi Responden Berdasarkan Lama Menjabat

Lama Menjabat	Jumlah Responden	Persentase
< 1 tahun	3	3%
1 – 3 tahun	55	52%
4 – 6 tahun	23	22%
> 6 tahun	25	24%
Total	106	100%

Sumber: Data Primer Diolah, 2021.

Berdasarkan tabel di atas, mayoritas responden telah menjabat pada jabatannya saat ini dalam rentang lama menjabat 1 hingga 3 tahun (52%). Diikuti dengan 25 responden yang telah menjabat pada jabatannya saat ini selama lebih dari 6 tahun (24%). Sedikit berbeda jumlahnya dengan responden dengan lama menjabat 1 hingga 3 tahun, responden yang telah menjabat selama 4 hingga 6 tahun berjumlah 23 responden (22%). Sementara jumlah paling sedikit merupakan responden yang menduduki jabatannya saat ini selama kurang dari 1 tahun yaitu berjumlah 3 responden (3%). Rekapitulasi yang terakhir dilakukan berdasarkan lama bekerja responden. Tabel 4.8 berikut menggambarkan rekapitulasi tersebut.

Tabel 4. 8 Rekapitulasi Responden Berdasarkan Lama Bekerja

Lama Bekerja	Jumlah Responden	Persentase
< 5 tahun	1	1%
5 – 10 tahun	9	8%
11 – 15 tahun	25	24%
> 15 tahun	71	67%
Total	106	100%

Sumber: Data Primer Diolah, 2021.

Berdasarkan tabel di atas, jumlah responden yang bekerja kurang dari 5 tahun adalah sebanyak 1 responden saja (1%). Disusul dengan 9 responden yang telah bekerja selama 5 hingga 10 tahun (8%). Kemudian untuk responden yang telah bekerja selama 11 hingga 15 tahun diketahui berjumlah 25 responden (24%). Sedangkan jumlah terbanyak adalah responden yang telah bekerja lebih dari 15 tahun yaitu berjumlah 71 responden (67%).

4.2 Uji Instrumen Penelitian

4.2.1 Hasil Uji Validitas

Uji validitas berguna untuk melakukan pengukuran atas kevalidan data dalam kuesioner. Kuesioner dapat dikatakan valid apabila sesuatu yang akan diukur dalam kuesioner tersebut mampu diungkapkan (Ghozali, 2018). Uji validitas dalam penelitian ini dilakukan dengan melakukan korelasi bivariante antara masing-masing skor indikator dengan total skor variabel. Korelasi tersebut dilakukan dengan teknik *Pearson-Correlation*. Item pertanyaan dalam kuesioner dapat dikatakan valid apabila $r\text{-hitung} > r\text{-tabel}$. Perhitungan $r\text{-tabel}$ menggunakan asumsi $df = (N-2)$ atau 104 ($106-2$) dengan tingkat signifikansi 0,05. Hasil yang di dapat untuk $r\text{-tabel}$ adalah sebesar 0,191. Tabel 4.9 berikut menunjukkan hasil uji validitas dengan menggunakan *Pearson-Correlation*.

Tabel 4. 9 Hasil Uji Validitas

Variabel	Butir	r hitung	r tabel	Keterangan
Penyerapan Anggaran	PYA1	0,778	0,191	Valid
	PYA2	0,693		Valid
	PYA3	0,776		Valid
	PYA4	0,780		Valid
Perencanaan Anggaran	PRA1	0,790		Valid
	PRA2	0,765		Valid
	PRA3	0,820		Valid
	PRA4	0,635		Valid
Komitmen Organisasi	KO1	0,852		Valid
	KO2	0,842		Valid
	KO3	0,659		Valid
	KO4	0,849		Valid
Regulasi	REG1	0,727		Valid
	REG2	0,854		Valid
	REG3	0,784		Valid
	REG4	0,757		Valid
Pemahaman Sistem Prosedur Pengelolaan Keuangan	PSPK1	0,849	Valid	
	PSPK2	0,889	Valid	
	PSPK3	0,882	Valid	
	PSPK4	0,870	Valid	

Sumber: Hasil Olah Data, 2022.

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh nilai r-hitung melebihi nilai r-tabel pada seluruh item validitas. Hal tersebut mencerminkan seluruh butir instrumen pertanyaan dalam penelitian ini dinyatakan valid. Kevalidan butir-butir instrumen pertanyaan yang berhubungan dengan penyerapan anggaran, perencanaan anggaran, komitmen organisasi, regulasi, dan pemahaman sistem prosedur pengelolaan keuangan memiliki arti bahwa seluruh pertanyaan yang terdapat dalam kuesioner penelitian dapat digunakan dalam penelitian.

4.2.2 Hasil Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas merupakan uji yang digunakan untuk mengukur tingkat reliabilitas indikator dari variabel dalam suatu kuesioner. Kuesioner dapat dikatakan reliabel atau handal apabila jawaban responden terhadap pertanyaan

dalam kuesioner konsisten dari waktu ke waktu (Ghozali, 2018). Pengukuran uji reliabilitas menggunakan cara *One Shot Method* atau pengukuran sekali saja. Cara tersebut hanya menggunakan satu kali pengukuran. Hasil dari pengukuran tersebut selanjutnya dicari korelasi antar jawaban pertanyaan dengan cara dibandingkan. Indikator dari variabel dikatakan reliabel apabila memiliki nilai *Cronbach's Alpha* $> 0,70$ (Nunnally dan Bernstein, 1994). Hasil uji reliabilitas pada penelitian ini disajikan dalam Tabel 4.10.

Tabel 4. 10 Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	Keterangan
Penyerapan Anggaran	0,747	Reliabel
Perencanaan Anggaran	0,740	Reliabel
Komitmen Organisasi	0,792	Reliabel
Regulasi	0,784	Reliabel
Pemahaman Sistem Prosedur Pengelolaan Keuangan	0,895	Reliabel

Sumber: Hasil Olah Data, 2022.

Berdasarkan tabel di atas, angka *Cronbach's Alpha* yang dihasilkan pada masing-masing butir atau indikator dalam variabel diketahui memiliki nilai lebih dari 0,70. Sehingga dapat disimpulkan, seluruh jawaban responden terhadap pertanyaan yang disajikan dalam kuesioner konsisten.

4.3 Uji Asumsi Klasik

4.3.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah nilai residual memiliki distribusi normal atau tidak. Untuk menguji normalitas data dalam penelitian ini, digunakan uji statistik non-parametrik *Kolmogorov-Smirnov (K-S)*. Hasil uji normalitas akan dikatakan berdistribusi normal apabila memiliki nilai signifikansi

$> 0,05$. Sebaliknya, jika nilai signifikansi $< 0,05$ maka dapat dikatakan nilai residual tidak berdistribusi normal. Hasil uji normalitas dapat dilihat dalam Tabel 4.11.

Tabel 4. 11 Hasil Uji Normalitas

Variabel	Asymp.Sig. (2-tailed)	Keterangan
Penyerapan Anggaran	0,165	Normal
Perencanaan Anggaran	0,329	Normal
Komitmen Organisasi	0,144	Normal
Regulasi	0,108	Normal
Pemahaman Sistem Prosedur Pengelolaan Keuangan	0,134	Normal

Sumber: Hasil Olah Data, 2022.

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat nilai signifikansi keempat variabel penelitian memiliki nilai $> 0,05$ yang berarti data penelitian ini berdistribusi secara normal.

4.3.2 Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui hubungan korelasi antar variabel independen. Parameter uji ini dilihat dari nilai *tolerance* dan *variance inflation factor* (VIF). Model regresi dikatakan bebas multikolinearitas apabila nilai *tolerance* yang didapat $> 0,1$ dan nilai VIF < 10 . Berdasarkan hasil uji yang didapat, hasil nilai *tolerance* dan hasil nilai VIF tidak menggambarkan adanya multikolinearitas. Detail hasil uji dapat dilihat dalam Tabel 4.12 berikut.

Tabel 4. 12 Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
Perencanaan Anggaran	0,672	1,488	Bebas Multikolinearitas
Komitmen Organisasi	0,571	1,750	Bebas Multikolinearitas
Regulasi	0,616	1,624	Bebas Multikolinearitas

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
Pemahaman Sistem Prosedur Pengelolaan Keuangan	0,554	1,805	Bebas Multikolinearitas

Sumber: Hasil Olah Data, 2022.

4.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah terdapat ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain dalam model regresi. Uji yang digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya heteroskedastisitas adalah uji *glejser*. Suatu hasil dikatakan bebas heteroskedastisitas apabila nilai signifikansi antara variabel independen dengan nilai residualnya lebih dari 0,05. Interpretasi hasil uji heteroskedastisitas terdapat dalam Tabel 4.13 berikut.

Tabel 4. 13 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Sig	Keterangan
Perencanaan Anggaran	0,949	Bebas Heteroskedastisitas
Komitmen Organisasi	0,480	Bebas Heteroskedastisitas
Regulasi	0,278	Bebas Heteroskedastisitas
Pemahaman Sistem Prosedur Pengelolaan Keuangan	0,621	Bebas Heteroskedastisitas

Sumber: Hasil Olah Data, 2022.

Berdasarkan tabel di atas, nilai sig yang didapat untuk semua variabel independent bernilai $> 0,05$ yang bermakna bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi penelitian ini.

4.4 Analisis Regresi Linear Berganda

Variabel independen penelitian ini terdiri dari empat variabel yakni perencanaan anggaran, komitmen organisasi, regulasi, dan pemahaman sistem prosedur pengelolaan keuangan. Sedangkan untuk variabel dependennya yaitu

penyerapan anggaran. Analisis regresi linear berganda dilakukan untuk mengetahui pengaruh signifikan keempat variabel independen tersebut terhadap variabel dependen yang ada. Hasil analisis regresi linear berganda disajikan dalam Tabel 4.14.

Tabel 4. 14 Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Variabel	Koefisien Regresi
(Constant)	2,903
Perencanaan Anggaran	0,247
Komitmen Organisasi	0,173
Regulasi	0,184
Pemahaman Sistem Prosedur Pengelolaan Keuangan	0,262

Sumber: Hasil Olah Data, 2022.

Berdasarkan tabel di atas, diketahui hasil uji analisis regresi linear berganda menghasilkan persamaan regresi $PYA = 2,903 + 0,247 PRA + 0,173 KO + 0,184 REG + 0,262 PSPK$. Beberapa poin berikut menunjukkan detail interpretasi persamaan di atas:

1. Konstanta sebesar 2,903 menyatakan bahwa nilai konstanta tersebut menunjukkan nilai PYA sebesar 2,903 dengan nilai PRA, KO, REG, dan PSPK konstan.
2. Koefisien regresi PRA sebesar 0,247 menyatakan bahwa setiap penambahan 1 (satu) nilai PRA akan meningkatkan PYA sebesar 0,247.
3. Koefisien regresi KO sebesar 0,173 menyatakan bahwa setiap penambahan 1 (satu) nilai KO akan meningkatkan PYA sebesar 0,173.
4. Koefisien regresi REG sebesar 0,184 menyatakan bahwa setiap penambahan 1 (satu) nilai REG akan meningkatkan PYA sebesar 0,184.

5. Koefisien regresi PSPK sebesar 0,262 menyatakan bahwa setiap penambahan 1 (satu) nilai PSPK akan meningkatkan PYA sebesar 0,262.

4.5 Uji Statistik F

Uji statistik F dilakukan untuk menunjukkan kelayakan pada model penelitian. Uji F bertujuan untuk mengetahui apakah variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018). Uji F digunakan juga untuk menilai kelayakan model regresi yang telah terbentuk. Pengujian yang dilakukan pada penelitian ini menggunakan tingkat signifikansi 0,05. Hasil pengujian statistik F penelitian ini memiliki tingkat signifikansi $< 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan model penelitian ini layak uji. Hasil uji statistik F yang dihasilkan dapat dilihat dalam Tabel 4.15.

Tabel 4. 15 Hasil Uji Statistik F

Model	Sig.
Regresi	0,000

Sumber: Hasil Olah Data, 2022.

Berdasarkan tabel di atas, tingkat signifikansi yang dihasilkan pada model regresi menggunakan uji statistik F diperoleh tingkat signifikansi 0,000 atau kurang dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan model penelitian ini layak uji.

4.6 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi (R^2) dilakukan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Apabila hasil uji ini menghasilkan hasil yang mendekati nol, maka variabel independen sangat terbatas dalam menjelaskan

variabel dependen. Sedangkan apabila hasilnya mendekati satu maka, variabel independen dapat memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi dalam variabel independen. Hasil uji koefisien determinasi (R^2) disajikan dalam Tabel 4.16 berikut.

Tabel 4. 16 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Nilai R	Nilai R Square	Nilai Adjusted R Square
0,840	0,706	0,694

Sumber: Hasil Olah Data, 2022.

Berdasarkan tabel di atas, nilai *adjusted R square* sebesar 0,694 (69,4%) menggambarkan besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen penelitian ini. Sehingga dapat disimpulkan, besar pengaruh perencanaan anggaran, komitmen organisasi, regulasi, dan pemahaman sistem prosedur pengelolaan keuangan terhadap penyerapan anggaran adalah sebesar 0,694 (69,4%).

4.7 Uji Statistik T

Uji statistik T dilakukan dengan tujuan mengetahui seberapa jauh pengaruh masing-masing variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Kriteria pengujian uji statistik T dilihat berdasarkan tingkat signifikansi. Apabila hasil uji menunjukkan tingkat signifikansi $< 0,05$ maka, dapat dikatakan variabel independen secara individu berpengaruh terhadap variabel dependen. Hasil uji statistik T diinterpretasikan oleh Tabel 4.17 berikut.

Tabel 4. 17 Hasil Uji Statistik T

Hipotesis	Hubungan	Koefisien (Beta)	T-Statistik	Hasil
H1	PRA → PYA	0,247	4,437*	Didukung
H2	KO → PYA	0,173	3,165*	Didukung
H3	REG → PYA	0,184	2,668*	Didukung
H4	PSPK → PYA	0,262	4,852*	Didukung

Signifikansi: *sig < 0,05

Sumber: Hasil Olah Data, 2022.

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh nilai t-statistik dan pengukuran berdasarkan nilai signifikansi untuk masing-masing variabel independen.

Penjelasan mengenai hasil di atas dideskripsikan oleh beberapa poin berikut:

1. Tingkat signifikansi variabel perencanaan anggaran kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan hipotesis 1 **diterima**. Hal tersebut memcerminkan perencanaan anggaran berpengaruh terhadap penyerapan anggaran. Hasil t-statistik variabel perencanaan anggaran sebesar 4,437 menggambarkan pengaruh **positif** yang bermakna semakin baik perencanaan anggaran yang dibuat oleh Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Magelang maka, realisasi penyerapan anggaran akan semakin baik pula.
2. Tingkat signifikansi variabel komitmen organisasi kurang dari 0,05, yang berarti hipotesis 2 penelitian ini **diterima**. Pernyataan tersebut bermakna komitmen organisasi berpengaruh terhadap penyerapan anggaran. Besaran t-statistik variabel komitmen organisasi sebesar 3,165 juga memberi makna pengaruh **positif**. Sehingga dapat disimpulkan semakin tinggi komitmen yang dimiliki pegawai pada Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten

Magelang, maka semakin mudah tercapai pula tujuan perangkat daerah yang salah satunya merupakan peningkatan penyerapan anggaran.

3. Tingkat signifikansi variabel regulasi kurang dari 0,05. Hal ini berarti hipotesis 3 penelitian ini **diterima** sehingga dapat disimpulkan regulasi berpengaruh terhadap penyerapan anggaran. Variabel regulasi memiliki pengaruh **positif** berkaitan dengan besaran t-statistik 2,668. Kesimpulan yang didapat yakni semakin tinggi tingkat pemahaman dan kepatuhan pegawai perangkat daerah terhadap regulasi mengenai anggaran, maka penyerapan anggaran akan semakin meningkat.
4. Variabel pemahaman sistem prosedur pengelolaan keuangan memiliki tingkat signifikansi kurang dari 0,05 serta nilai t-statistik sebesar 4,852. Berkaitan dengan hal tersebut, hipotesis 4 penelitian ini juga **diterima**. Sehingga kesimpulan yang diperoleh yakni pemahaman sistem prosedur pengelolaan keuangan memiliki pengaruh secara **positif** terhadap penyerapan anggaran. Semakin baik tingkat pemahaman pegawai perangkat daerah kaitannya dengan mekanisme sistem pengelolaan keuangan maka, semakin meningkat pula tingkat penyerapan anggaran.

4.8 Pembahasan Hasil Penelitian

4.8.1 Pengaruh Perencanaan Anggaran terhadap Penyerapan Anggaran

Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda pada uji statistik T diperoleh hasil perencanaan anggaran berpengaruh positif signifikan terhadap penyerapan anggaran. Hasil tersebut bermakna semakin baik perencanaan anggaran yang dibuat oleh Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Magelang maka,

semakin baik tingkat realisasi penyerapan anggaran. Dengan demikian hipotesis pertama penelitian ini dapat diterima dan sesuai dengan rasionalisasi hubungan *agency theory* dengan perencanaan anggaran yang sudah dijelaskan pada bab 2.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Ramdhani dan Anisa (2017); Elim *et al.*, (2018) yang menyatakan perencanaan anggaran berpengaruh secara positif signifikan terhadap penyerapan anggaran. Baiknya perencanaan anggaran yang dilakukan akan mempermudah implementasi pelaksanaan anggaran sehingga realisasi penyerapan anggaran akan semakin baik (Ramdhani dan Anisa, 2017). Menurut Wijayanti *et al.* (2012); Muhammad (2016); Zarinah *et al.* (2016); Jauhari (2017) perencanaan anggaran dipengaruhi oleh beberapa faktor meliputi, ketepatan waktu saat penetapan perencanaan, kesesuaian proyek dengan perencanaan yang telah dibuat, bentuk adaptasi akan adanya perencanaan yang belum sesuai kebutuhan, dan kemampuan pegawai dalam penyusunan dokumen perencanaan sesuai dengan prosedur yang ada.

Berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan anggaran di atas, penelitian ini dapat memberi kontribusi kepada Pemerintah Kabupaten Magelang dalam hal perencanaan anggaran diantaranya, penetapan perencanaan dapat lebih tepat waktu, adanya *monitoring* yang dapat memastikan kesesuaian proyek dengan perencanaan yang telah dibuat, perencanaan yang sudah sesuai maupun yang belum sesuai dapat lebih lebih terpetakan, dan Pemerintah yang lebih *intens* memperhatikan kapasitas pegawai kaitannya dengan penyusunan dokumen perencanaan sehingga dimungkinkan diadakan pelatihan dan *monitoring* secara lebih *massive*.

4.8.2 Pengaruh Komitmen Organisasi terhadap Penyerapan Anggaran

Hasil yang diperoleh dari uji statistik T analisis regresi linear berganda merepresentasikan bahwa komitmen organisasi berpengaruh secara positif signifikan terhadap penyerapan anggaran. Hal ini berarti semakin tingginya komitmen pegawai mengenai pencapaian tujuan anggaran perangkat daerah, salah satu tujuan anggaran yakni tingginya serapan anggaran juga semakin mudah tercapai. Dengan demikian, hipotesis kedua penelitian ini dapat diterima. Hasil penelitian juga menunjukkan kesesuaian *goal setting theory* sebagai teori yang mendasari rasionalisasi hubungan komitmen organisasi dengan penyerapan anggaran.

Putri *et al.* (2017) mengemukakan hasil penelitian yang sejalan dengan penelitian ini bahwa komitmen organisasi berpengaruh secara positif terhadap penyerapan anggaran. Namun, hasil berbeda ditemukan oleh Alumbida *et al.* (2016) yang menyatakan bahwa komitmen organisasi berpengaruh positif tidak signifikan terhadap penyerapan anggaran. Komitmen yang tinggi dalam suatu organisasi khususnya dalam perangkat daerah dipengaruhi oleh beberapa faktor, yakni besar kepercayaan terhadap tujuan organisasi, kemauan berusaha dan bekerja keras, sistem *reward* dan *punishment*, serta dukungan pegawai terhadap program kegiatan yang menunjang proses penganggaran seperti pelatihan dalam hal penganggaran dan pengelolaan keuangan (Rustini *et al.*, 2015; Elim *et al.*, 2018).

Setelah memperoleh gambaran mengenai hal-hal yang mempunyai pengaruh terhadap komitmen organisasi, Pemerintah Kabupaten Magelang dapat mengadakan lebih banyak kegiatan yang menunjang proses pelaksanaan anggaran

seperti pelatihan mengenai mekanisme penganggaran dan pengelolaan keuangan serta menerapkan sistem *reward* dan *punishment* kepada pegawai terhadap persoalan anggaran. Sebagai bentuk *mutualisme*, pegawai perangkat daerah diharapkan berpartisipasi pada kegiatan tersebut serta mendukung dengan memberikan rasa kepercayaan terhadap tujuan organisasi, kemauan berusaha dan bekerja keras.

4.8.3 Pengaruh Regulasi terhadap Penyerapan Anggaran

Uji statistik T variabel regulasi berdasarkan hasil uji regresi linear berganda memberikan hasil bahwa regulasi mempunyai pengaruh secara positif terhadap penyerapan anggaran. Sesuai dengan rasionalisasi dalam hipotesis ketiga, semakin tingginya tingkat pemahaman dan kepatuhan pegawai perangkat daerah terhadap regulasi mengenai anggaran, penyerapan anggaran yang terealisasi akan semakin meningkat pula. Dengan demikian, hipotesis ketiga penelitian ini dapat diterima.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian milik Ramadhani dan Setiawan (2019) bahwa regulasi berpengaruh secara positif terhadap penyerapan anggaran. Perubahan mekanisme penganggaran yang sering berubah dan ketersediaan waktu yang sedikit membuat para pegawai perangkat daerah harus selalu memahami setiap aturan dan regulasi mengenai penganggaran yang ada termasuk apabila dilakukan perubahan. Tingkat penyerapan anggaran yang maksimal dapat tercapai apabila perangkat daerah dapat menerapkan aturan dan regulasi penganggaran dengan baik.

Dalam hal regulasi, adanya penelitian ini dapat membuat pegawai perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Magelang lebih memahami setiap aturan dan regulasi mengenai penganggaran yang ada termasuk apabila dilakukan perubahan serta lebih memperhatikan waktu yang tersedia. Tingkat penyerapan anggaran Kabupaten Magelang dapat lebih maksimal karena perangkat daerah dapat menerapkan aturan dan regulasi penganggaran dengan baik. Hal itu dikarenakan setiap aturan dan regulasi yang berlaku dapat lebih matang dipahami oleh pegawai sehingga kendala saat implementasi kegiatan dapat terminimalisir.

4.8.4 Pengaruh Pemahaman Sistem Prosedur Pengelolaan Keuangan terhadap Penyerapan Anggaran

Analisis regresi linear berganda untuk variabel pemahaman sistem prosedur pengelolaan keuangan memberi hasil pemahaman sistem prosedur pengelolaan keuangan berpengaruh secara positif signifikan terhadap penyerapan anggaran. Dengan begitu, hipotesis keempat penelitian ini juga dapat diterima. Semakin baik tingkat pemahaman pegawai perangkat daerah kaitannya dengan mekanisme sistem pengelolaan keuangan maka, semakin meningkat pula tingkat penyerapan anggaran.

Muhammad (2016) mengemukakan hasil penelitian yang sejalan dengan penelitian ini yakni terdapat pengaruh secara positif pemahaman sistem prosedur pengelolaan keuangan terhadap penyerapan anggaran. Berkaitan dengan penganggaran, pegawai perangkat daerah harus dapat menyusun dokumen perencanaan anggaran hingga laporan pertanggungjawaban setiap periode. Sehubungan dengan hal tersebut, dibutuhkan pemahaman yang cukup atas mekanisme sistem akuntansi keuangan daerah yang meliputi pencatatan setiap

transaksi keuangan yang terjadi, pengklasifikasian transaksi, pengikhtisaran, serta pelaporan data keuangan. *Monitoring* atas pelaksanaan kegiatan dalam hal ini diperlukan juga untuk memahami unsur pengendalian internal dalam instansi. Widiawati (2019) dalam hal ini juga memperkuat pernyataan bahwa pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh secara positif signifikan terhadap pengelolaan keuangan.

Implikasi penelitian ini dalam hal pemahaman sistem prosedur pengelolaan keuangan yaitu, pegawai perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Magelang yang lebih memiliki pemahaman berkaitan dengan mekanisme sistem akuntansi keuangan daerah yang meliputi pencatatan setiap transaksi keuangan yang terjadi, pengklasifikasian transaksi, pengikhtisaran, serta pelaporan data keuangan. Implikasi lain yakni terkait dengan pengendalian internal, didapat pegawai yang lebih memahami unsur pengendalian internal di dalam instansinya dalam rangka melakukan *monitoring* atas pelaksanaan kegiatan dalam perangkat daerah masing-masing.

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh perencanaan anggaran, komitmen organisasi, regulasi, dan pemahaman sistem prosedur pengelolaan keuangan terhadap penyerapan anggaran di lingkungan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Magelang. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa:

1. Perencanaan anggaran berpengaruh secara positif signifikan terhadap penyerapan anggaran. Hal ini menunjukkan semakin baik perencanaan anggaran yang dibuat oleh Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Magelang maka, semakin baik tingkat realisasi penyerapan anggaran.
2. Komitmen organisasi berpengaruh secara positif signifikan terhadap penyerapan anggaran. Hasil tersebut bermakna semakin tingginya komitmen pegawai mengenai pencapaian tujuan anggaran perangkat daerah, salah satu tujuan anggaran yakni tingginya serapan anggaran juga semakin mudah tercapai.
3. Regulasi berpengaruh secara positif signifikan terhadap penyerapan anggaran. Berarti dapat disimpulkan, semakin tingginya tingkat pemahaman dan kepatuhan pegawai perangkat daerah terhadap regulasi mengenai anggaran, penyerapan anggaran yang terealisasi akan semakin meningkat pula.
4. Pemahaman sistem prosedur pengelolaan keuangan berpengaruh secara positif signifikan terhadap penyerapan anggaran. Hal ini berarti, semakin baik tingkat pemahaman pegawai perangkat daerah kaitannya dengan

mekanisme sistem pengelolaan keuangan maka, semakin meningkat pula tingkat penyerapan anggaran

5.2 Kontribusi dan Implikasi Penelitian

5.2.1 Kontribusi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman dan pengetahuan pada bidang akuntansi sektor publik serta mendukung berkembangnya penelitian dalam hal penganggaran sektor publik. Peneliti-peneliti lain dapat mendapatkan kesempatan dan peluang untuk mengembangkan penelitian dalam bidang akuntansi sektor publik khususnya mengenai penganggaran sektor publik.

5.2.2 Implikasi Penelitian

Hasil penelitian ini menunjukkan beberapa faktor yang mempunyai pengaruh terhadap penyerapan anggaran. Perencanaan anggaran, komitmen organisasi, regulasi, dan pemahaman sistem prosedur pengelolaan keuangan merupakan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap penyerapan anggaran. Agar pelaksanaan anggaran dapat lebih efektif dan efisien serta tidak terjadi lagi penumpukan anggaran di akhir tahun ataupun minimnya tingkat anggaran yang terserap di awal tahun, beberapa poin berikut dapat lebih dijadikan perhatian bagi Pemerintah Kabupaten Magelang:

1. Dalam hal perencanaan anggaran, Pemerintah Kabupaten Magelang dapat lebih memperhatikan beberapa hal yakni, ketepatan waktu penetapan perencanaan, kesesuaian proyek dengan perencanaan yang telah dibuat, bentuk adaptasi akan adanya perencanaan yang belum sesuai kebutuhan,

dan kemampuan pegawai dalam penyusunan dokumen perencanaan sesuai dengan prosedur yang ada.

2. Kaitannya dengan komitmen organisasi, Pemerintah Kabupaten Magelang dapat mengadakan lebih banyak kegiatan yang menunjang proses pelaksanaan anggaran seperti pelatihan mengenai mekanisme penganggaran dan pengelolaan keuangan serta menerapkan sistem *reward* dan *punishment* kepada pegawai terhadap persoalan anggaran. Disamping itu, pegawai perangkat daerah diharapkan berpartisipasi pada kegiatan tersebut serta mendukung dengan memberikan rasa kepercayaan terhadap tujuan organisasi, kemauan berusaha dan bekerja keras.
3. Sementara dalam hal Regulasi, pegawai perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Magelang dapat lebih memahami setiap aturan dan regulasi mengenai penganggaran yang ada termasuk apabila dilakukan perubahan. Tingkat penyerapan anggaran yang maksimal dapat tercapai apabila perangkat daerah dapat menerapkan aturan dan regulasi penganggaran dengan baik. Pemerintah Kabupaten Magelang dapat mengadakan sosialisasi kepada pegawai perangkat daerah terutama yang berurusan langsung dengan penganggaran mengenai setiap aturan dan regulasi yang berlaku termasuk apabila aturan dan regulasi tersebut mengalami perubahan.
4. Untuk hal pemahaman sistem prosedur pengelolaan keuangan, kemampuan pegawai perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Magelang dalam menyusun dokumen perencanaan anggaran hingga laporan pertanggungjawaban setiap periode dapat meningkat. Termasuk juga

peningkatan dalam hal pemahaman pegawai atas mekanisme sistem akuntansi keuangan daerah. Pemahaman pegawai mengenai unsur pengendalian internal di dalam instansinya dapat meningkat pula. Hal tersebut dalam rangka melakukan *monitoring* atas pelaksanaan kegiatan dalam perangkat daerah masing-masing sehingga kegiatan dapat terlaksana dengan baik dan lebih terkontrol.

Selain untuk Pemerintah Kabupaten Magelang, penelitian ini juga diharapkan dapat menambah wawasan masyarakat mengenai penganggaran sektor publik khususnya realita penyerapan anggaran yang berjalan di Pemerintah Kabupaten Magelang. Dengan mengetahui realita penyerapan anggaran, masyarakat dapat memahami bagaimana pelayanan Pemerintah Kabupaten Magelang yang berhubungan dengan penyerapan anggaran seperti realisasi pembangunan infrastruktur dan tingkat kesejahteraan masyarakat.

5.3 Keterbatasan dan Saran Penelitian

5.3.1 Keterbatasan Penelitian

Setelah menjalani proses penelitian, peneliti menyadari bahwa penelitian ini belum sepenuhnya sempurna. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan sehingga diperlukan perbaikan dan pengembangan untuk penelitian-penelitian selanjutnya. Adapun keterbatasan penelitian ini yakni:

1. Penelitian ini menggunakan data primer dengan menggunakan kuesioner, sehingga jawaban responden hanya berupa persepsi.

2. Proses pengambilan data memerlukan waktu yang lama karena peneliti harus mendatangi masing-masing Perangkat Daerah. Terlebih kondisi wilayah Kabupaten Magelang yang sangat luas dengan Perangkat Daerah yang tersebar. Lamanya waktu pengambilan data juga disebabkan karena tidak semua pegawai yang menjadi sasaran responden tidak ada di kantor (sedang perjalanan dinas).
3. Penelitian ini menggunakan sistem kuesioner *online* via *google form*, sementara tidak semua pegawai memahami mekanisme penggunaannya. Oleh karena itu, beberapa responden harus didampingi dalam hal pengisian kuesioner penelitian.

5.3.2 Saran Penelitian

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari sempurna, oleh sebab itu peneliti memberikan beberapa saran yang dapat dijadikan pertimbangan bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengadakan penelitian dengan topik penelitian yang sama. Beberapa saran berikut mungkin dapat dijadikan sebagai pertimbangan:

1. Penelitian selanjutnya bisa menambahkan data penelitian berupa data sekunder seperti Laporan Keuangan Pemerintah Daerah khususnya Laporan Realisasi Anggaran yang disajikan dalam beberapa tahun untuk dijadikan perbandingan sehingga diharapkan dapat memperkuat hasil penelitian.
2. Dapat dipertimbangkan dalam hal model kuesioner yang akan diberikan kepada responden penelitian (kuesioner *hardcopy* tulis tangan atau *form online*) mengingat kapasitas setiap responden berbeda-beda.

3. Peneliti selanjutnya dapat menambah atau melakukan variasi dalam penentuan variabel penelitian yang berkaitan dengan penyerapan anggaran, menambah cakupan luasnya responden, dan melakukan penelitian pada Perangkat Daerah lain ataupun organisasi non-sektor publik.



DAFTAR REFERENSI

- Alim, M. N. (2008). Efektivitas Perpaduan Komponen Anggaran dalam Prosedur Anggaran: Pengujian Kontinjensi Matching. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 10(2), 69–76.
- Alimuddin. (2018). Analisis Penyerapan Anggaran Di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Kopertis Makassar. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Alumbida, D. I., Saerang, D. P. ., & Ilat, V. (2016). Pengaruh Perencanaan, Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Komitmen Organisasi terhadap Penyerapan Anggaran Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal Accountability*, 5(2), 141–151.
- Annisa, V. (2017). Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Good Governance terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Pekanbaru). *Jurnal Faculty of Economics Riau University, Pekanbaru*, 4(1), 1873–1885.
- Anthony, R. N., & Govindarajan, V. (2011). *Management Control System : Sistem Pengendalian Manajemen* (2nd ed.). Salemba Empat.
- Arif, E., & Halim, A. (2013). *Identifikasi Faktor-Faktor Penyebab Minimnya Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2011*.
- Arifah, D. A. (2012). *Praktek Teori Agensi pada Entitas Publik dan Non Publik*. Prestasi, 9(1), 85–95.
- Bastian, I. (2006). *Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Daerah di Indonesia* (Krista (ed.)). Salemba Empat.
- Bastian, I. (2010). *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*. Salemba Empat.
- Bastian, I. (2019). *Lingkup Akuntansi Sektor Publik*. *Lingkup Akuntansi Sektor Publik*.
- BPKP. (2011). Menyoal Penyerapan Anggaran. *Paris Review*, 1–56.
- Bryman, A. (2012). *Social Research Methods (4th ed.)*. Oxford University Press.
- Cooper, D., & Schindler, P. (2013). *Business Research Methods: 12th Edition*. McGraw-Hill Education.
- Dewi, N. L. P. L., Dwirandra, A. A. N. & Wirakusuma, M. G. (2017). Kemampuan Komitmen Organisasi Memoderasi Pengaruh Perencanaan dan Kompetensi SDM pada Penyerapan Anggaran Pemerintah Kabupaten Tabanan. *E-Jurnal Ekonomi & Bisnis* 6, 4, 1609–1638.
- Elim, M. A., Ndaparoka, D. S., & Tomasowa, T. E. D. (2018). Analisis Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Belanja pada Organisasi

- Perangkat Daerah di Kota Kupang. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, dan Audit*, 3(2), 46–56.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25* (9th ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Griffin, M. L., Hogan, N. L., Lambert, E. G., Tucker-Gail, K. A., & Baker, D. N. (2010). Job Involvement, Job Stress, Job Satisfaction, and Organizational Commitment and The Burnout of Correctional Staff. *Criminal Justice and Behavior*, 37(2), 239–255.
- Halim, A. (2014). *Manajemen Keuangan Sektor Publik: Problematika Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintahan (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah)*. Salemba Empat.
- Handayani, C. T. (2017). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Serapan Anggaran SKPD di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014-2015 dengan SILPA sebagai Variabel Moderating*.
- Henry, G. T. (1990). *Practical Sampling*. Sage.
- Jauhari. (2017). *Pengaruh Perencanaan Anggaran dan Pelaksanaan Anggaran terhadap Serapan Anggaran Satuan Kerja Wilayah Pembayaran KPPN Bandung I dan KPPN Bandung II*, 1-33.
- Junita, A. (2018). Determinan Kinerja Anggaran Pemerintah Daerah dengan Perubahan Anggaran sebagai Pemediasi dan Teknologi Informasi sebagai Pemoderasi. In *Universitas Sumatera Utara*. 1-202.
- Kevin, L. (1987). *Good City Form*. Massachusetts: The MIT Press.
- Kothari, C. . (2004). *Research Methodology: Methods and Techniques*. New Age International.
- Kuncoro, M. (2013). *Mudah Memahami dan Menganalisis Indikator Ekonomi*. UMP STIM YKPN.
- Locke, E. A. (1968). Toward A Theory of Task Motivation and Incentives. *Organizational Behaviour and Human Performance*, 3(2), 157–189.
- Lubis, A. I. (2010). *Akuntansi Keperilakuan* (Edisi Dua). Salemba Empat.
- Mahsun, M. (2006). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta : BPFE - Yogyakarta.
- Malahayati, C., Islahuddin, & Basri, H. (2015). Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Perencanaan Anggaran, dan Pelaksanaan Anggaran Terhadap Serapan Anggaran pada Pemerintah Kota Banda Aceh. *Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, 4(1), 11–19.
- Mardiasmo. (2004). *Akuntansi Sektor Publik*. Andi.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Andi.

- Muhammad, A. N. (2016). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta*, 1-61.
- Munandar, M. (2013). Perencanaan Kerja, Pengkoordinasian Kerja dan Pengawasan Kerja. *Jurnal 9*.
- Nasution, D. A. D. (2019). *Akuntansi Sektor Publik (Mahir dalam Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Daerah)* (1st ed.). Uwais Inspirasi Indonesia.
- Nordiawan, D., & Hertianti, A. (2010). *Akuntansi Sektor Publik*. Salemba Empat.
- Noviwijaya, A., & Rahman, A. (2013). Pengaruh Keragaman Gender dan Usia Pejabat Perbendaharaan terhadap Penyerapan Anggaran Satuan Kerja (Studi Empiris pada Satuan Kerja Lingkup Pembayaran KPPN Semarang I). *Diponegoro Journal of Accounting*, 2(3), 1–10.
- Nunnally, J. C., & Bernstein, I. H. (1994). *Psychometric Theory*. McGraw-Hill.
- Octariani, D., Akram, A., & Animah, A. (2017). Anggaran Berbasis Kinerja, Sumber Daya Manusia, dan Kualitas Anggaran SKPD (Suatu Pengujian Struktural). *Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 2(1), 27–41.
- Oktaverina, C., Kurniawan, M. F., Rachma, I. N. A., & Prawira, I. F. A. (2019). Perkembangan Sistem dan Teknik Penganggaran Sektor Publik Berbasis Kinerja. *Sistem Informasi, Keuangan, Auditing, Dan Perpajakan*, 4(1), 21–28.
- Pujihastuti, I. (2010). Prinsip Penulisan Kuesioner Penelitian. *CEFARS: Jurnal Agribisnis dan Pengembangan Wilayah*, 2(1), 43–56.
- Putri, K. M. R., Yuniarti, G. A., & Prayudi, M. A. (2017). Penyerapan Anggaran (Survei pada SKPD di Wilayah Pemerintah Daerah Provinsi Bali). *E-Journal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, 2(8).
- Ramadhani, R., & Setiawan, M. A. (2019). Pengaruh Regulasi, Politik Anggaran, Perencanaan Anggaran, Sumber Daya Manusia dan Pengadaan Barang/Jasa terhadap Penyerapan Anggaran Belanja pada OPD Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(2), 710–726.
- Ramdhani, D., & Anisa, I. Z. (2017). Pengaruh Perencanaan Anggaran, Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pelaksanaan Anggaran. *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu*, 10(1), 134–148.
- Ratag, W. A., Kumenaung, A. G., & Engka, D. S. (2019). Pengaruh Perencanaan Anggaran terhadap Penyerapan Anggaran di Lingkungan Universitas Sam Ratulangi. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 20(3), 78–91.
- Robbins, S. & Judge, T. (2007). *Organizational Behaviour* (12th ed). Pearson Prentice Hall.
- Rustini, N. K. A., Suardhika, I. M. S., & Astika, I. B. P. (2015). Pengaruh

- Kompensasi dan Lingkungan Kerja pada Komitmen Organisasi dan Implikasinya pada Kinerja Pengelolaan Anggaran (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Tabanan). *Jurnal Buletin Studi Ekonomi*, 20(2), 123–129.
- Salwah, A. (2019). Pengaruh Perencanaan Anggaran dan Pelaksanaan Anggaran Terhadap Serapan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada Pemerintah Kota Banda Aceh. *Jurnal Transformasi Administrasi*, 9(2), 164–182.
- Sanjaya, T. (2018). Pengaruh Regulasi Keuangan Daerah, Politik Anggaran dan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa terhadap Penyerapan Anggaran pada OPD Provinsi Sumatera Barat. *Akuntansi*, 2(4), 2–9.
- Saunders, M., Lewis, P., & Thornhill, A. (2009). *Research Methods for Business Students Fifth Edition*. In *Pearson: Vol. Fifth Edit*. Prentice Hall.
- Scott, W. R. (1997). *Financial Accounting Theory*. New Jersey Prentice Hall.
- Scott, W. R. (2009). *Financial Accounting Theory (Fifth Edit)*. New Jersey Prentice Hall.
- Seftianova, R., & Adam, H. (2013). Pengaruh Kualitas DIPA dan Akurasi Perencanaan pada Satker Wilayah KPPN Malang. *Jurnal Riset Akuntansi & Komputerisasi Akuntansi*, 4(1), 75–84.
- Smith, R. W., & Bertozzi, M. (2010). Principals and Agents: An Explanatory Model for Public Budgeting. *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management*, 10(3), 325–353.
- Suandy, E. (2011). *Perencanaan Pajak (Edisi 5)*. Salemba Empat.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, dan R&D*. CV. Alfabeta.
- Sujai, M. (2012). Evaluasi Percepatan Penyerapan Anggaran Kementerian dan Lembaga. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi*, 9(1), 1-11.
- Sujarweni, V. W. (2014). *Metodologi Penelitian*. Pustaka Baru Press.
- Utomo, K. C., & Mulyanto. (2014). Pengaruh Perencanaan Anggaran, Kompetensi Pegawai, Reformasi Birokrasi, dan Disiplin Kerja Terhadap Motivasi dan Penyerapan Anggaran. *Jurnal Ekonomi Dan Kewirausahaan*, 1–15.
- Widiawati. (2019). Pengaruh Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Komitmen Organisasi terhadap Pengelola Keuangan. *Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Mulawarman*.
- Wijayanti, A. W., Muluk, M. R. K., & Nurpratiwi, R. (2012). Perencanaan Anggaran Berbasis Kinerja. *Wacana*, 14(3), 10–17.

Williams, C. (2007). Research Methods. *Journal of Business and Economic Research*, 5(3), 65–72.

Zarinah, M., Darwanis, & Abdullah, S. (2016). Pengaruh Perencanaan Anggaran dan Kualias Sumber Daya Manusia terhadap Tingkat Penyerapan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Kabupaten Aceh Utara. *Magister Akuntansi Pasca Sarjana Universitas Syiah Kuala*, 5(1), 90–97.





LAMPIRAN – LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

Kuesioner Penelitian

Assalamualaikum.Wr.Wb.

Perkenalkan saya Nabila Yulia Dewi, Mahasiswi Program Studi S1 Akuntansi, Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia. Saat ini saya sedang melakukan penelitian tugas akhir dengan judul “PENGARUH PERENCANAAN ANGGARAN, KOMITMEN ORGANISASI, REGULASI, DAN PEMAHAMAN SISTEM PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN TERHADAP PENYERAPAN ANGGARAN PADA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG”.

Adapun kriteria responden dalam penelitian ini yaitu :

1. Bapak/Ibu/Saudara/i yang menduduki jabatan pada unit kerja sebagai Kasubbag Perencanaan dan Evaluasi/Kasubbag Program/Kasubbag Keuangan/Bendahara Pengeluaran (bagi Perangkat Daerah tipe A).
2. Bapak/Ibu/Saudara/i yang menduduki jabatan pada unit kerja sebagai Kasubbag Program dan Keuangan/Bendahara Pengeluaran (bagi Perangkat Daerah tipe B).

Maka dari itu, Bapak/Ibu/Saudara/i dimohon dengan hormat untuk mengisi identitas dengan lengkap dan memilih salah satu jawaban yang menggambarkan kondisi Bapak/Ibu/Saudara/i. Setiap pertanyaan mohon hanya diisi dengan satu jawaban.

Survei ini tidak untuk dipublikasikan, data atau informasi yang dikumpulkan hanya digunakan untuk kepentingan penelitian dan akan dijaga kerahasiaannya.

Apabila terdapat pertanyaan, informasi tambahan, atau hal lainnya terkait kuesioner penelitian ini, Bapak/Ibu/Saudara/i dapat menghubungi saya melalui e-mail: 18312006@students.uii.ac.id atau Whatsapp: 081225443524.

Atas dukungan dan partisipasi Bapak/Ibu/Saudara, saya ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum.Wr.Wb

Hormat Saya,

Nabila Yulia Dewi

Petunjuk Pengisian :

Dimohon untuk memilih salah satu jawaban yang sesuai dengan kondisi Bapak/Ibu/Saudara/i berdasarkan keterangan di bawah ini:

- 1 : Sangat Tidak Setuju
- 2 : Tidak Setuju
- 3 : Agak Tidak Setuju
- 4 : Agak Setuju
- 5 : Setuju
- 6 : Sangat Setuju

1. Nama (optional) :
2. Jenis Kelamin :
 - a. Laki-Laki
 - b. Perempuan
3. Usia :
4. Pendidikan Terakhir :
 - a. S1
 - b. S2
 - c. S3
 - d. Lainnya
5. Instansi/Perangkat Daerah :
6. Jabatan pada Unit Kerja sebagai :
 - a. Kasubbag Perencanaan dan Evaluasi
 - b. Kasubbag Keuangan

- c. Kasubbag Program dan Keuangan
 - d. Bendahara Pengeluaran
7. Lama menjabat :
- a. < 1 tahun
 - b. 1 – 3 tahun
 - c. 4 – 6 tahun
 - d. > 6 tahun
8. Lama bekerja :
- a. < 5 tahun
 - b. 5 – 10 tahun
 - c. 11 – 15 tahun
 - d. > 15 tahun

Penyerapan Anggaran

No	Pernyataan	1	2	3	4	5	6
1	Perangkat Daerah Anda memiliki tingkat penyerapan anggaran pada triwulan IV lebih dari 90%						
2	Perangkat Daerah Anda melakukan evaluasi secara berkala terkait penyerapan anggaran per triwulannya untuk dijadikan acuan perbaikan penyerapan anggaran untuk triwulan yang akan datang						
3	Penyerapan anggaran Perangkat Daerah Anda sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat						
4	Tingkat penyerapan anggaran pada Perangkat Daerah Anda naik dari tahun sebelumnya						

Perencanaan Anggaran

No	Pernyataan	1	2	3	4	5	6
1	Penetapan perencanaan anggaran Perangkat Daerah Anda selalu tepat waktu						
2	Proyek Perangkat Daerah Anda dilaksanakan sesuai dengan perencanaan anggaran yang telah dibuat						
3	Perubahan anggaran diperlukan ketika perencanaan anggaran Perangkat Daerah Anda belum sesuai dengan kebutuhan						
4	Anda mampu menyusun dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sesuai dengan prosedur yang ada dengan tujuan agar perencanaan anggaran dapat terorganisir dengan baik						

Komitmen Organisasi

No	Pernyataan	1	2	3	4	5	6
1	Anda memiliki kepercayaan yang kuat terhadap tujuan organisasi Perangkat Daerah Anda						
2	Anda memiliki kemauan yang kuat untuk berusaha dan bekerja keras untuk organisasi Perangkat Daerah Anda						
3	Komitmen Anda terkait pengelolaan anggaran Perangkat Daerah dipengaruhi oleh <i>Reward</i>						

	dan <i>Punishment</i> yang diberikan kepada Anda						
4	Anda mendukung dilaksanakannya pelatihan dalam hal penganggaran dan pengelolaan keuangan						

Regulasi

No	Pernyataan	1	2	3	4	5	6
1	Menurut Anda aturan dan regulasi mengenai mekanisme penganggaran sering mengalami perubahan						
2	Anda dapat memahami aturan dan regulasi mengenai mekanisme penganggaran Perangkat Daerah						
3	Perubahan aturan dan regulasi mengenai mekanisme penganggaran yang cepat dengan ketersediaan waktu yang sedikit dapat menyebabkan kendala dalam mengimplementasikan kegiatan pada Perangkat Daerah Anda						
4	Aturan dan regulasi mengenai mekanisme penganggaran pada perangkat daerah Anda dapat diterapkan dengan baik						

Pemahaman Sistem Prosedur Pengelolaan Keuangan

No	Pernyataan	1	2	3	4	5	6
1	Anda mampu menyusun Rencana Kerja dan Anggaran dan Laporan Pertanggungjawaban untuk setiap periode yang dibutuhkan pada Perangkat Daerah terkait						
2	Anda mampu melakukan pencatatan setiap transaksi keuangan yang terjadi sesuai ketentuan yang berlaku pada Perangkat Daerah terkait						
3	Anda mampu memahami sistem akuntansi keuangan daerah dalam bentuk pelaporan akuntansi yang meliputi pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran, serta pelaporan data keuangan						
4	Anda mampu memahami unsur pengendalian internal yang dimaksudkan untuk <i>monitoring</i> pelaksanaan kegiatan pada Perangkat Daerah Anda						

الجمهورية الإسلامية اندونيسية

LAMPIRAN 2

Daftar Rekapitulasi Jawaban Responden

No Resp	PRA					KO				
	Perencanaan Anggaran					Komitmen Organisasi				
	PRA.1	PRA.2	PRA.3	PRA.4	Skor	KO.1	KO.2	KO.3	KO.4	Skor
1	3	6	6	3	18	6	6	4	6	22
2	4	6	4	4	18	4	4	5	3	16
3	6	6	6	2	20	6	6	6	6	24
4	4	5	6	2	17	4	5	4	6	19
5	5	5	5	4	19	5	5	5	6	21
6	5	5	5	5	20	5	5	2	5	17
7	5	6	6	1	18	6	6	4	6	22
8	6	5	5	2	18	5	6	5	5	21
9	6	6	5	3	20	6	6	6	6	24
10	4	3	3	4	14	6	6	2	5	19
11	3	3	3	3	12	3	4	3	3	13
12	5	4	2	2	13	5	5	5	5	20
13	3	3	3	3	12	3	3	2	3	11
14	5	6	2	2	15	6	6	5	6	23
15	4	4	4	4	16	6	6	5	6	23
16	4	4	3	4	15	5	3	3	3	14
17	4	4	4	3	15	3	4	4	3	14
18	4	5	2	3	14	5	5	3	4	17
19	4	4	3	4	15	5	5	5	6	21
20	4	3	3	4	14	6	6	2	6	20
21	3	4	3	3	13	4	5	1	6	16
22	6	6	5	5	22	6	6	5	6	23
23	3	4	4	4	15	6	5	6	5	22
24	4	4	3	3	14	5	5	5	5	20
25	4	4	4	4	16	4	3	3	3	13
26	3	3	3	3	12	5	6	4	5	20
27	5	4	4	5	18	5	6	3	6	20
28	4	4	3	4	15	4	3	3	5	15
29	5	5	5	2	17	4	4	3	4	15
30	3	3	3	3	12	5	5	3	5	18
31	5	5	5	4	19	5	5	4	5	19
32	4	4	4	4	16	6	6	3	5	20
33	5	5	5	4	19	6	6	6	6	24
34	5	4	4	5	18	3	4	4	4	15

No Resp	PRA					KO				
	Perencanaan Anggaran					Komitmen Organisasi				
	PRA.1	PRA.2	PRA.3	PRA.4	Skor	KO.1	KO.2	KO.3	KO.4	Skor
35	4	4	5	5	18	5	5	5	5	20
36	4	4	4	4	16	3	4	4	3	14
37	4	4	5	5	18	6	6	5	6	23
38	4	4	5	4	17	4	4	4	4	16
39	5	5	5	5	20	5	4	5	4	18
40	4	5	4	4	17	5	6	6	6	23
41	4	4	4	4	16	5	6	2	6	19
42	3	3	4	3	13	6	6	5	6	23
43	3	3	4	4	14	4	5	3	5	17
44	5	5	5	4	19	6	6	5	6	23
45	4	4	4	3	15	5	6	3	6	20
46	4	4	3	4	15	6	4	4	4	18
47	4	4	3	4	15	5	5	5	5	20
48	5	5	4	4	18	5	4	4	5	18
49	4	4	4	3	15	5	5	5	5	20
50	3	3	4	4	14	5	5	5	6	21
51	5	5	5	5	20	5	5	6	6	22
52	5	5	2	2	14	5	5	5	5	20
53	5	5	4	4	18	6	6	3	6	21
54	4	4	4	4	16	5	4	6	5	20
55	4	4	3	3	14	5	5	3	5	18
56	3	3	3	3	12	5	5	4	5	19
57	4	4	3	3	14	5	6	5	5	21
58	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12
59	3	4	3	4	14	5	6	5	5	21
60	4	5	5	5	19	5	5	4	5	19
61	4	4	4	4	16	5	5	2	6	18
62	4	4	3	3	14	4	5	5	5	19
63	4	4	4	4	16	5	5	4	6	20
64	4	3	4	3	14	5	5	5	6	21
65	3	4	3	3	13	4	4	4	4	16
66	6	5	5	6	22	6	6	5	5	22
67	4	4	3	3	14	5	5	3	4	17
68	4	4	5	4	17	6	6	2	5	19
69	5	5	5	5	20	5	5	4	4	18
70	4	3	3	3	13	3	3	3	3	12
71	5	5	2	2	14	4	4	3	4	15
72	4	5	5	5	19	6	6	6	6	24

No Resp	PRA					KO				
	Perencanaan Anggaran					Komitmen Organisasi				
	PRA.1	PRA.2	PRA.3	PRA.4	Skor	KO.1	KO.2	KO.3	KO.4	Skor
73	4	4	4	4	16	5	5	5	6	21
74	4	5	4	4	17	5	5	3	5	18
75	5	5	4	4	18	5	6	6	5	22
76	6	5	5	5	21	6	5	6	6	23
77	5	5	5	4	19	3	4	4	3	14
78	5	4	4	4	17	4	4	4	4	16
79	4	4	4	4	16	5	5	2	6	18
80	5	4	5	5	19	5	5	5	5	20
81	5	5	4	4	18	6	6	5	6	23
82	4	4	4	3	15	5	6	5	5	21
83	4	5	4	4	17	4	4	3	3	14
84	4	4	5	4	17	5	3	5	5	18
85	4	4	3	3	14	5	5	2	5	17
86	4	4	4	4	16	5	5	3	5	18
87	4	5	5	3	17	6	6	5	6	23
88	6	6	6	4	22	6	6	6	6	24
89	5	4	4	4	17	5	6	5	5	21
90	6	5	6	6	23	5	6	6	6	23
91	2	2	3	2	9	5	5	3	5	18
92	5	5	5	5	20	4	4	4	4	16
93	2	3	2	2	9	4	4	5	6	19
94	5	5	5	6	21	5	5	5	5	20
95	5	5	4	5	19	6	6	5	6	23
96	4	3	3	4	14	6	6	3	6	21
97	5	5	6	5	21	6	6	6	6	24
98	5	6	5	5	21	6	6	5	6	23
99	4	4	5	4	17	5	5	4	5	19
100	5	6	6	5	22	6	6	5	6	23
101	4	5	5	4	18	5	4	5	5	19
102	6	6	4	2	18	5	5	4	3	17
103	5	5	2	2	14	4	4	3	4	15
104	4	5	4	4	17	4	4	4	4	16
105	6	5	5	5	21	6	6	5	6	23
106	4	4	5	4	17	4	3	4	4	15

No Resp	REG					PSPK				
	Regulasi					Pemahaman Sistem Prosedur Pengelolaan Keuangan				
	REG. 1	REG. 2	REG. 3	REG. 4	Skor	PSPK. 1	PSPK. 2	PSPK. 3	PSPK. 4	Skor
1	4	6	6	5	21	6	6	5	5	22
2	3	3	4	4	14	5	4	4	5	18
3	5	6	5	5	21	5	5	5	4	19
4	5	5	4	5	19	5	4	3	4	16
5	5	5	5	5	20	5	5	5	5	20
6	5	5	5	6	21	5	6	5	5	21
7	4	6	6	6	22	6	4	4	4	18
8	4	4	4	5	17	6	5	5	5	21
9	5	5	5	5	20	5	4	4	6	19
10	4	4	4	3	15	4	4	4	3	15
11	5	5	4	4	18	6	6	6	5	23
12	4	4	4	4	16	5	5	3	4	17
13	4	4	4	4	16	3	3	3	3	12
14	5	5	5	6	21	6	6	6	6	24
15	4	4	4	4	16	6	6	5	5	22
16	4	4	4	4	16	4	4	4	5	17
17	3	4	4	4	15	4	4	4	4	16
18	4	4	4	5	17	5	4	4	4	17
19	4	5	4	4	17	5	5	4	5	19
20	4	5	5	5	19	5	5	5	4	19
21	3	4	3	4	14	6	4	4	4	18
22	5	6	5	6	22	6	6	6	6	24
23	5	5	4	4	18	5	5	4	5	19
24	4	4	4	5	17	5	6	5	5	21
25	4	5	5	5	19	4	3	3	4	14
26	5	5	5	5	20	4	4	4	4	16
27	4	6	5	5	20	3	3	6	5	17
28	4	4	4	4	16	5	3	3	3	14
29	4	4	4	3	15	3	3	5	4	15
30	4	4	4	4	16	3	3	3	3	12
31	4	4	2	4	14	5	5	4	5	19
32	5	5	4	5	19	5	4	4	4	17
33	6	5	5	5	21	6	6	6	6	24
34	5	5	5	5	20	6	4	3	3	16
35	4	4	4	4	16	5	5	4	4	18
36	4	4	3	4	15	4	4	4	4	16
37	4	4	4	5	17	6	6	6	6	24

No Resp	REG					PSPK				
	Regulasi					Pemahaman Sistem Prosedur Pengelolaan Keuangan				
	REG. 1	REG. 2	REG. 3	REG. 4	Skor	PSPK. 1	PSPK. 2	PSPK. 3	PSPK. 4	Skor
38	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16
39	5	4	4	4	17	6	5	5	6	22
40	5	5	5	5	20	5	5	5	5	20
41	5	5	6	5	21	5	4	5	5	19
42	4	3	4	4	15	3	3	3	3	12
43	4	4	5	4	17	3	4	3	3	13
44	4	5	5	5	19	6	6	5	5	22
45	5	5	5	5	20	4	4	3	4	15
46	5	5	5	4	19	4	4	4	4	16
47	4	5	4	5	18	4	4	3	4	15
48	5	5	5	4	19	4	5	5	4	18
49	5	5	5	4	19	5	5	5	5	20
50	5	5	5	5	20	4	4	4	3	15
51	6	6	6	5	23	4	5	5	4	18
52	4	5	5	4	18	5	5	5	5	20
53	5	6	5	4	20	6	5	5	6	22
54	4	4	4	4	16	4	6	5	5	20
55	4	4	5	4	17	5	4	4	4	17
56	5	5	5	5	20	4	5	4	4	17
57	4	5	5	5	19	4	4	4	4	16
58	2	2	3	3	10	3	3	3	2	11
59	5	5	4	4	18	5	5	5	5	20
60	5	5	6	5	21	5	5	4	5	19
61	6	5	5	5	21	5	5	5	5	20
62	5	5	6	6	22	4	4	4	6	18
63	4	5	4	5	18	5	5	5	4	19
64	4	4	4	5	17	5	5	5	5	20
65	5	5	5	6	21	6	6	6	6	24
66	4	6	5	5	20	6	5	6	6	23
67	5	5	4	5	19	5	5	5	5	20
68	4	4	4	3	15	6	5	6	6	23
69	5	6	4	4	19	5	5	5	5	20
70	4	5	4	4	17	2	3	3	3	11
71	2	5	5	5	17	5	5	5	5	20
72	6	6	5	6	23	5	4	4	5	18
73	5	6	5	5	21	5	5	5	5	20
74	4	6	4	5	19	5	5	5	5	20

No Resp	REG					PSPK				
	Regulasi					Pemahaman Sistem Prosedur Pengelolaan Keuangan				
	REG. 1	REG. 2	REG. 3	REG. 4	Skor	PSPK. 1	PSPK. 2	PSPK. 3	PSPK. 4	Skor
75	6	5	5	5	21	6	5	5	5	21
76	6	6	5	5	22	6	6	5	5	22
77	4	3	4	4	15	3	3	3	6	15
78	4	4	4	4	16	5	5	5	5	20
79	4	4	5	5	18	5	5	5	5	20
80	4	5	4	5	18	5	4	5	5	19
81	5	6	5	5	21	6	5	5	6	22
82	5	5	5	5	20	5	5	5	5	20
83	4	4	4	4	16	5	5	4	4	18
84	5	5	5	5	20	5	4	4	5	18
85	2	5	5	5	17	5	4	3	3	15
86	4	4	3	4	15	3	3	3	3	12
87	5	5	4	5	19	4	5	4	4	17
88	6	6	5	5	22	6	6	6	6	24
89	4	5	5	4	18	6	5	5	5	21
90	6	6	5	5	22	6	5	5	5	21
91	3	4	4	4	15	3	3	4	4	14
92	3	5	5	5	18	5	4	5	4	18
93	5	5	5	4	19	4	4	4	4	16
94	5	4	5	4	18	5	5	5	5	20
95	5	5	4	4	18	6	6	6	6	24
96	4	6	5	6	21	6	6	4	5	21
97	5	6	5	6	22	6	6	6	6	24
98	5	6	4	5	20	6	6	6	6	24
99	5	5	5	5	20	5	5	5	5	20
100	5	6	4	6	21	6	6	6	6	24
101	3	5	4	4	16	5	5	4	4	18
102	5	6	5	3	19	5	5	5	5	20
103	3	4	3	4	14	4	3	3	3	13
104	5	5	5	5	20	5	5	5	5	20
105	3	5	5	5	18	5	6	5	6	22
106	5	3	3	4	15	3	5	4	4	16

No Resp	PYA				
	Penyerapan Anggaran				
	PYA.1	PYA.2	PYA.3	PYA.4	Skor
1	6	6	5	6	23
2	5	4	4	6	19
3	6	3	6	6	21
4	4	4	4	5	17
5	5	5	4	5	19
6	5	5	5	6	21
7	6	4	5	6	21
8	5	5	5	5	20
9	6	5	6	3	20
10	4	4	4	5	17
11	4	4	3	4	15
12	5	5	5	4	19
13	4	3	3	3	13
14	6	5	4	4	19
15	5	5	4	4	18
16	5	5	2	5	17
17	4	4	4	5	17
18	4	4	4	4	16
19	5	5	5	5	20
20	5	4	4	5	18
21	4	3	4	4	15
22	6	5	6	6	23
23	5	5	5	5	20
24	4	4	5	5	18
25	4	4	4	4	16
26	5	5	4	5	19
27	5	4	4	5	18
28	5	2	5	5	17
29	4	4	5	4	17
30	3	4	3	3	13
31	5	5	4	5	19
32	5	5	5	5	20
33	5	5	5	6	21
34	6	2	5	4	17
35	5	2	5	5	17
36	4	4	5	5	18
37	5	4	5	5	19

No Resp	PYA				
	Penyerapan Anggaran				
	PYA.1	PYA.2	PYA.3	PYA.4	Skor
38	4	4	4	3	15
39	5	5	4	4	18
40	5	5	5	5	20
41	6	5	5	5	21
42	3	3	4	4	14
43	4	4	4	4	16
44	6	5	5	5	21
45	5	5	4	4	18
46	4	4	5	5	18
47	5	4	5	4	18
48	5	4	4	4	17
49	5	5	4	4	18
50	4	4	4	5	17
51	5	5	5	5	20
52	5	5	4	4	18
53	4	4	4	4	16
54	4	4	5	4	17
55	5	4	4	4	17
56	4	4	5	5	18
57	4	4	5	5	18
58	3	3	3	4	13
59	4	4	5	5	18
60	4	4	5	5	18
61	5	5	4	5	19
62	5	5	5	5	20
63	6	4	4	5	19
64	4	5	5	5	19
65	5	5	4	4	18
66	6	6	6	6	24
67	5	5	5	5	20
68	4	5	5	5	19
69	5	5	5	4	19
70	3	3	4	3	13
71	5	2	5	5	17
72	5	5	5	5	20
73	5	5	4	4	18
74	5	4	4	4	17
75	5	6	5	6	22

No Resp	PYA				
	Penyerapan Anggaran				
	PYA.1	PYA.2	PYA.3	PYA.4	Skor
76	6	5	6	6	23
77	4	4	4	4	16
78	4	4	5	4	17
79	4	5	5	5	19
80	5	5	4	4	18
81	5	5	5	5	20
82	5	4	5	5	19
83	4	4	5	5	18
84	5	5	5	5	20
85	4	4	5	4	17
86	4	4	3	3	14
87	4	4	4	4	16
88	6	5	6	6	23
89	6	5	6	5	22
90	5	5	5	6	21
91	4	4	4	4	16
92	4	4	5	5	18
93	5	4	4	4	17
94	5	6	6	5	22
95	6	4	6	6	22
96	5	5	5	5	20
97	5	6	6	6	23
98	6	6	6	6	24
99	5	5	5	5	20
100	6	6	6	5	23
101	5	4	5	5	19
102	5	5	4	5	19
103	4	4	4	4	16
104	4	6	4	5	19
105	6	6	6	5	23
106	4	5	5	5	19

LAMPIRAN 3

Daftar Nama Perangkat Daerah

No	Nama Perangkat Daerah	Jumlah Kuesioner yang Dibagikan	Jumlah Kuesioner yang Kembali	Jumlah Kuesioner yang Diolah
1	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah	3	3	3
2	Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	3	3	3
3	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	3	3	3
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3	3	3
5	Sekretariat DPRD	3	3	3
6	Dinas Peternakan dan Perikanan	3	3	3
7	Dinas Pertanian dan Pangan	3	3	3
8	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3	3	3
9	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3	3	3
10	Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga	3	3	3
11	Dinas Lingkungan Hidup	3	3	3
12	Dinas Kesehatan	3	3	3
13	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	3	3	3
14	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	3	3	3
15	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3	3	3
16	Inspektorat	3	3	3
17	Dinas Komunikasi dan Informatika	2	2	2
18	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	2	2	2
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2	2	2

No	Nama Perangkat Daerah	Jumlah Kuesioner yang Dibagikan	Jumlah Kuesioner yang Kembali	Jumlah Kuesioner yang Diolah
20	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	2	2	2
21	Dinas Perhubungan	2	2	2
22	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2	2	2
23	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran	2	2	2
24	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2	2	2
25	Kecamatan Srumbung	2	2	2
26	Kecamatan Ngluwar	2	2	2
27	Kecamatan Salam	2	2	2
28	Kecamatan Dukun	2	2	2
29	Kecamatan Sawangan	2	2	2
30	Kecamatan Muntilan	2	2	2
31	Kecamatan Mungkid	2	2	2
32	Kecamatan Borobudur	2	2	2
33	Kecamatan Tempuran	2	2	2
34	Kecamatan Kajoran	2	2	2
35	Kecamatan Salaman	2	2	2
36	Kecamatan Kaliangkrik	2	2	2
37	Kecamatan Bandongan	2	2	2
38	Kecamatan Windusari	2	2	2
39	Kecamatan Secang	2	2	2
40	Kecamatan Grabag	2	2	2
41	Kecamatan Ngablak	2	2	2
42	Kecamatan Pakis	2	2	2
43	Kecamatan Tegalrejo	2	2	2
44	Kecamatan Candimulyo	2	2	2
45	Kecamatan Mertoyudan	2	2	2
Total		106	106	106

LAMPIRAN 4

Daftar Informasi Responden

Jenis Kelamin	Jumlah Responden	Persentase
Laki-Laki	35	33%
Perempuan	71	67%
Total	100	100%

Usia Responden	Jumlah Responden	Persentase
< 30 tahun	4	4%
30 – 35 tahun	7	7%
36 – 40 tahun	11	10%
41 – 45 tahun	27	25%
46 – 50 tahun	20	19%
51 – 55 tahun	27	25%
> 55 tahun	10	9%
Total	106	100%

Tingkat Pendidikan	Jumlah Responden	Persentase
S1	43	41%
S2	29	27%
S3	0	0%
Lainnya	34	32%
Total	106	100%

Jabatan pada Unit Kerja sebagai	Jumlah Responden	Persentase
Kasubbag Perencanaan dan Evaluasi	16	15%
Kasubbag Keuangan	16	15%
Kasubbag Program dan Keuangan	29	27%
Bendahara Pengeluaran	45	42%
Total	106	100%

Lama Menjabat	Jumlah Responden	Persentase
< 1 tahun	3	3%
1 – 3 tahun	55	52%
4 – 6 tahun	23	22%
> 6 tahun	25	24%
Total	106	100%

Lama Bekerja	Jumlah Responden	Persentase
< 5 tahun	1	1%
5 – 10 tahun	9	8%
11 – 15 tahun	25	24%
> 15 tahun	71	67%
Total	106	100%



LAMPIRAN 5

Hasil Uji Validitas

Hasil Uji Validitas Variabel Perencanaan Anggaran (PRA)

Correlations

		PRA.1	PRA.2	PRA.3	PRA.4	Perencanaan Anggaran
PRA.1	Pearson Correlation	1	.714**	.456**	.271**	.790**
	Sig. (2-tailed)		0,000	0,000	0,005	0,000
	N	106	106	106	106	106
PRA.2	Pearson Correlation	.714**	1	.520**	0,132	.765**
	Sig. (2-tailed)	0,000		0,000	0,176	0,000
	N	106	106	106	106	106
PRA.3	Pearson Correlation	.456**	.520**	1	.443**	.820**
	Sig. (2-tailed)	0,000	0,000		0,000	0,000
	N	106	106	106	106	106
PRA.4	Pearson Correlation	.271**	0,132	.443**	1	.635**
	Sig. (2-tailed)	0,005	0,176	0,000		0,000
	N	106	106	106	106	106
Perencanaan Anggaran	Pearson Correlation	.790**	.765**	.820**	.635**	1
	Sig. (2-tailed)	0,000	0,000	0,000	0,000	
	N	106	106	106	106	106

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Hasil Uji Validitas Variabel Komitmen Organisasi (KO)

Correlations

		KO.1	KO.2	KO.3	KO.4	Komitmen Organisasi
KO.1	Pearson Correlation	1	.759**	.341**	.714**	.852**
	Sig. (2-tailed)		0,000	0,000	0,000	0,000
	N	106	106	106	106	106
KO.2	Pearson Correlation	.759**	1	.283**	.736**	.842**
	Sig. (2-tailed)	0,000		0,003	0,000	0,000
	N	106	106	106	106	106
KO.3	Pearson Correlation	.341**	.283**	1	.322**	.659**
	Sig. (2-tailed)	0,000	0,003		0,001	0,000
	N	106	106	106	106	106
KO.4	Pearson Correlation	.714**	.736**	.322**	1	.849**
	Sig. (2-tailed)	0,000	0,000	0,001		0,000
	N	106	106	106	106	106
Komitmen Organisasi	Pearson Correlation	.852**	.842**	.659**	.849**	1
	Sig. (2-tailed)	0,000	0,000	0,000	0,000	
	N	106	106	106	106	106

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Hasil Uji Validitas Variabel Regulasi (REG)

Correlations

		REG.1	REG.2	REG.3	REG.4	Regulasi
REG.1	Pearson Correlation	1	.496**	.383**	.331**	.727**
	Sig. (2-tailed)		0,000	0,000	0,001	0,000
	N	106	106	106	106	106
REG.2	Pearson Correlation	.496**	1	.588**	.566**	.854**
	Sig. (2-tailed)	0,000		0,000	0,000	0,000
	N	106	106	106	106	106
REG.3	Pearson Correlation	.383**	.588**	1	.518**	.784**
	Sig. (2-tailed)	0,000	0,000		0,000	0,000
	N	106	106	106	106	106
REG.4	Pearson Correlation	.331**	.566**	.518**	1	.757**
	Sig. (2-tailed)	0,001	0,000	0,000		0,000
	N	106	106	106	106	106
Regulasi	Pearson Correlation	.727**	.854**	.784**	.757**	1
	Sig. (2-tailed)	0,000	0,000	0,000	0,000	
	N	106	106	106	106	106

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Hasil Uji Validitas Variabel Pemahaman Sistem Prosedur Pengelolaan Keuangan (PSPK)

Correlations

		PSPK.1	PSPK.2	PSPK.3	PSPK.4	Pemahaman Sistem Prosedur Pengelolaan Keuangan
PSPK.1	Pearson Correlation	1	.719**	.608**	.626**	.849**
	Sig. (2-tailed)		0,000	0,000	0,000	0,000
	N	106	106	106	106	106
PSPK.2	Pearson Correlation	.719**	1	.729**	.660**	.889**
	Sig. (2-tailed)	0,000		0,000	0,000	0,000
	N	106	106	106	106	106
PSPK.3	Pearson Correlation	.608**	.729**	1	.750**	.882**
	Sig. (2-tailed)	0,000	0,000		0,000	0,000
	N	106	106	106	106	106
PSPK.4	Pearson Correlation	.626**	.660**	.750**	1	.870**
	Sig. (2-tailed)	0,000	0,000	0,000		0,000
	N	106	106	106	106	106
Pemahaman Sistem Prosedur Pengelolaan Keuangan	Pearson Correlation	.849**	.889**	.882**	.870**	1
	Sig. (2-tailed)	0,000	0,000	0,000	0,000	
	N	106	106	106	106	106

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Hasil Uji Validitas Variabel Penyerapan Anggaran (PYA)

Correlations

		PYA.1	PYA.2	PYA.3	PYA.4	Penyerapan Anggaran
PYA.1	Pearson Correlation	1	.398**	.506**	.473**	.778**
	Sig. (2-tailed)		0,000	0,000	0,000	0,000
	N	106	106	106	106	106
PYA.2	Pearson Correlation	.398**	1	.296**	.344**	.693**
	Sig. (2-tailed)	0,000		0,002	0,000	0,000
	N	106	106	106	106	106
PYA.3	Pearson Correlation	.506**	.296**	1	.568**	.776**
	Sig. (2-tailed)	0,000	0,002		0,000	0,000
	N	106	106	106	106	106
PYA.4	Pearson Correlation	.473**	.344**	.568**	1	.780**
	Sig. (2-tailed)	0,000	0,000	0,000		0,000
	N	106	106	106	106	106
Penyerapan Anggaran	Pearson Correlation	.778**	.693**	.776**	.780**	1
	Sig. (2-tailed)	0,000	0,000	0,000	0,000	
	N	106	106	106	106	106

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

LAMPIRAN 6

Hasil Uji Reliabilitas

Hasil Uji Reliabilitas Variabel Perencanaan Anggaran (PRA)

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	106	100,0
	Excluded ^a	0	0,0
	Total	106	100,0
a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.			

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
0,740	4

Hasil Uji Reliabilitas Variabel Komitmen Organisasi (KO)

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	106	100,0
	Excluded ^a	0	0,0
	Total	106	100,0
a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.			

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
0,792	4

Hasil Uji Reliabilitas Variabel Regulasi (REG)

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	106	100,0
	Excluded ^a	0	0,0
	Total	106	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
0,784	4

Hasil Uji Reliabilitas Variabel Pemahaman Sistem Prosedur Pengelolaan Keuangan (PSPK)

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	106	100,0
	Excluded ^a	0	0,0
	Total	106	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
0,895	4

Hasil Uji Reliabilitas Variabel Penyerapan Anggaran (PYA)

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	106	100,0
	Excluded ^a	0	0,0
	Total	106	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
0,747	4

LAMPIRAN 7

Hasil Uji Asumsi Klasik

Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Perencanaan Anggaran	Komitmen Organisasi	Regulasi
N		106	106	106
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	16.52	19.18	18.37
	Std. Deviation	2.879	3.174	2.427
Most Extreme Differences	Absolute	.092	.111	.117
	Positive	.092	.064	.090
	Negative	-.076	-.111	-.117
Kolmogorov-Smirnov Z		.949	1.148	1.207
Asymp. Sig. (2-tailed)		.329	.144	.108

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Pemahaman Sistem Prosedur Pengelolaan Keuangan	Penyerapan Anggaran
N		106	106
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	18.65	18.57
	Std. Deviation	3.269	2.434
Most Extreme Differences	Absolute	.113	.108
	Positive	.076	.108
	Negative	-.113	-.100
Kolmogorov-Smirnov Z		1.162	1.117
Asymp. Sig. (2-tailed)		.134	.165

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2.903	1.091		2.662	.009
	Perencanaan Anggaran	.247	.056	.292	4.437	.000
	Komitmen Organisasi	.173	.055	.226	3.165	.002
	Regulasi	.184	.069	.183	2.668	.009
	Pemahaman Sistem					
	Prosedur Pengelolaan Keuangan	.262	.054	.352	4.852	.000

a. Dependent Variable: Penyerapan Anggaran

Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Perencanaan Anggaran	.672	1.488
	Komitmen Organisasi	.571	1.750
	Regulasi	.616	1.624
	Pemahaman Sistem		
	Prosedur Pengelolaan Keuangan	.554	1.805

a. Dependent Variable: Penyerapan Anggaran

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	1.192	.617		1.933	.056
Perencanaan Anggaran	-.002	.031	-.008	-.065	.949
Komitmen Organisasi	.022	.031	.093	.708	.480
Regulasi	-.043	.039	-.137	-1.091	.278
Pemahaman Sistem Prosedur Pengelolaan Keuangan	.015	.031	.066	.496	.621

a. Dependent Variable: ABS_RES



LAMPIRAN 8
Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	2.903	1.091		2.662	.009
Perencanaan Anggaran	.247	.056	.292	4.437	.000
Komitmen Organisasi	.173	.055	.226	3.165	.002
Regulasi	.184	.069	.183	2.668	.009
Pemahaman Sistem	.262	.054	.352	4.852	.000
Prosedur Pengelolaan Keuangan					

a. Dependent Variable: Penyerapan Anggaran

Hasil Uji Statistik F

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	439.171	4	109.793	60.640	.000^b
Residual	182.867	101	1.811		
Total	622.038	105			

a. Dependent Variable: Penyerapan Anggaran

b. Predictors: (Constant), Pemahaman Sistem Prosedur Pengelolaan Keuangan, Regulasi, Perencanaan Anggaran, Komitmen Organisasi

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.840 ^a	.706	.694	1.346

a. Predictors: (Constant), Pemahaman Sistem Prosedur Pengelolaan Keuangan, Regulasi, Perencanaan Anggaran, Komitmen Organisasi

b. Dependent Variable: Penyerapan Anggaran

Hasil Uji Statistik T

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	2.903	1.091		2.662	.009
Perencanaan Anggaran	.247	.056	.292	4.437	.000
Komitmen Organisasi	.173	.055	.226	3.165	.002
1 Regulasi	.184	.069	.183	2.668	.009
Pemahaman Sistem	.262	.054	.352	4.852	.000
Prosedur Pengelolaan Keuangan					

a. Dependent Variable: Penyerapan Anggaran

LAMPIRAN 9

Tabel r untuk df = N-2

df = (N-2)	Tingkat Signifikansi				
	0,1	0,05	0,02	0,01	0,001
101	0,1630	0,1937	0,2290	0,2528	0,3196
102	0,1622	0,1927	0,2279	0,2515	0,3181
103	0,1614	0,1918	0,2268	0,2504	0,3166
104	0,1606	0,1909	0,2257	0,2492	0,3152
105	0,1599	0,1900	0,2247	0,2480	0,3137
106	0,1591	0,1891	0,2236	0,2469	0,3123

